

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS
KINERJA DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

Oleh
MARINI INDRIANI
105730501114



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS
KINERJA DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

**Oleh
MARINI INDRIANI
105730501114**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Jangan sengaja pergi agar dicari, jangan sengaja lari agar dikejar, karena berjuang tak sepercanda itu"

"Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses.
Tuhan hanya menyuruh kita agar berjuang tanpa henti"

"Hidup ini seperti secangkir kopi, Dimana ada pahit dan manis melebur, bertemu dalam kehangatan"

"Kesuksesan itu nggak kayak indomi yang biasa dinikmati dengan proses instan, Karena kesuksesan adalah anak dari ketekunan dan kesabaran"

Persembahan

Sujud syukur ku persembahkan pada ALLAH yang maha kuasa, berkat dan rahamat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi ku pada orang tersayang:

Kedua orang tua ku Bapak dan Ibunda ku Tercinta yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini. Terima kasih buat Bapak dan Ibu.

..Marini Indriani..

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur atas izin dan petunjuk Allah SWT, sehingga skripsi dengan Judul : **“Efektivitas Penerepan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Makassar.”** dapat diselesaikan. Puji syukur kepada Allah SWT atas apa yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ini yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata dan dituliskan dengan kalimat apapun. Salam dan salawat atas junjungan Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa berada dalam panutan beliau untuk mencari kemaslahatan hingga akhir zaman.

Teristimewa, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku **Jarudin** dan **St. Hawa**, yang tiada batas memberi doa tulus dan dukungan yang tiada habisnya. Saudara dan keluarga atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Begitu pula ucapan terimakasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak., CA. CSP, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Dr. Edi Jusriadi, SE.,M.M., dan Ibu Muchriana Muchran, SE.,M.Si.,Ak.CA, selaku pembimbing I dan pembimbing II.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen di Jurusan Akuntansi yang telah memberikan banyak ilmu dan berbagi pengalaman selama penulis menimba ilmu di Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Para karyawan dan karyawan serta staff di BPKA kota Makassar yang telah membantu selama penulis meneliti.
7. Kepada kakak-kakak tercinta ku Jikran dan Tiflan yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
8. Rekan seperjuangan Jurusan Akuntansi Angkatan 2014 terkhusus kelas AK 9 Universitas Muhammadiyah Makassar, terima kasih atas solidaritas yang diberikan selama menjalani perkuliahan, semoga keakraban dan kebersamaan kita untuk selamanya.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak sempat disebutkan satu persatu semoga menjadi ibadah dan mendapat imbalan dari-Nya.

Akhirnya, *Tiada gading yang tak retak*, tak ada makhluk yang sempurna. Demikian pula dalam penulisan skripsi ini, masih terdapat kekurangan yang tentunya membutuhkan perbaikan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran, kritik yang Sifatnya membangun dari para pembaca.

Tiada imbalan yang dapat diberikan oleh penulis, hanya kepada Allah SWT penulis menyerahkan segalanya dan semoga bantuan yang diberikan selama ini bernilai ibadah disisi-Nya Amin...

Makassar, Oktober 2018

Penulis

ABSTRAK

Marini Indriani, 2018. Efektivitas penerepan anggaran berbasis kinerja dalam menilai kinerja keuangan pemerintah kota makassar, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Edi Jusriadi dan Pembimbing II Ibu Muchriana Muchran.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kota Makassar setelah pemberlakuan anggaran berbasis kinerja. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat analisis varians pendapatan daerah untuk mengetahui kinerja keuangan daerah pemerintah Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar periode 2014-2016.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Makassar secara umum dikatakan kurang baik dan masih tergolong rendah dan cenderung menurun dengan selisih realisasi APBD rata-rata 92,23%, Anggaran tidak dapat tercapai secara maksimal 100% dikarenakan adanya efisiensi belanja yang telah dilakukan oleh seluruh SKPD seperti misalnya dalam suatu lelang pembangunan fisik akan ada penawaran terendah namun hasilnya tetap sama. Kemudian dalam merealisasikan anggaran belanja dapat dikatakan tidak efektif dengan hasil presentase rata-rata 115,69%, ini mengindikasikan bahwa terjadinya pemborosan dalam penganggaran karena anggaran yang dikeluarkan melebihi dari 100%.

Kata Kunci : Anggaran Berbasis Kinerja, Kinerja Keuangan

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
---------------------	---

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	viii
ABSTRAC	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Keuangan Daerah.....	6
B. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	9
C. Anggaran Berbasis Kinerja.....	19
D. Tinjauan Empiris	22
E. Kerangka Konsep.....	29
F. Hipotesis	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Definisi Operasional	31

D. Populasi dan Sampel	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknis Analisis	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar.....	34
B. Hasil Penelitian.....	47
C. Pembahasan	49
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Nomor

Halaman

2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	26
3.2 Devinisi Operasional Variabel Dan Skala Pengukuran.....	32
4.3 Analisis Varians Pendapatan Daerah BPKA Kota Makassar	48

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
2.1 Kerangka Konsep	30
4.1 Struktur Organisasi BPKA Kota Makassar	36

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi APBD Kota Makassar Tahun 2014
2. Laporan Realisasi APBD Kota Makassar Tahun 2015
3. Laporan Realisasi APBD Kota Makassar Tahun 2016
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
6. Dokumentasi Penelitian

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah sekarang ini dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki, agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomi daerah yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik (Abdul Halim:2007). (Rahmad Hidayat, 2015)

Kinerja memang telah menjadi sorotan penting dalam seluruh tahapan penyelenggaraan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Kinerja pemerintah saat ini sering dinilai tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas. Dalam hal evaluasi kinerja saja hingga saat ini belum tersedia payung hukum yang menjadi dasar dan pedoman penyusunan dokumen evaluasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu minimnya jumlah dan kualitas pengelolaan kebijakan pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab kurang berkualitasnya produk kebijakan yang dihasilkan. Sehingga peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai salah satu visi/misi dan tujuan pemerintah daerah akan sulit tercapai. (Ira Halidayati, 2014)

Kinerja adalah Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. (Mohamad Mahsun, 2013:25). Tidak hanya kinerja yang menjadi sorotan saat ini, tetapi juga anggaran publik selalu dikaitkan dengan akuntabilitas eksekutif organisasi. Konflik yang terjadi dalam penentuan anggaran

sangat berpengaruh terhadap kapabilitas eksekutif organisasi untuk mengendalikan pengeluaran. (Indra Bastian, 2010:192)

Selain itu, sejalan dengan yang diamanatkan dalam undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang perimbangan keuangan Negara akan pula diterapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik agar penggunaan anggaran tersebut bisa dinilai kemanfaatan dan kegunaannya oleh masyarakat. Undang-undang No.17 tahun 2003 menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja Anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Adapun kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik (Mariana 2005). Melalui permendagri No. 13 tahun 2006 implementasi pradigma baru yang berorientasi pada prestasi kinerja dapat diterapkan dalam penyusunan APBD, baik dalam system akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran berbasis kinerja adalah memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Hal ini akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah. (Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, 2012:43). Dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja maka setiap pemerintah daerah akan diketahui

kinerjanya. Kinerja ini akan tercermin pada laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan prestasi kerja satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). (Sem Paulus Silahi, 2012)

Faktor lain yang turut menentukan suatu organisasi sukses dalam meningkatkan kinerja adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Menurut Mardiasmo dalam Almada (2013) menerangkan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah akan tercapai dengan dilaksanakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, artinya sistem akuntansi keuangan daerah dapat menimbulkan dukungan yang kuat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah yang dicapai (Rahmad Hidayat, 2015).

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Pasal 232 ayat (3) Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 dalam Abdul Halim, 2014:83)

Oleh karena itu, diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri (Bastian 2006:6). Hal tersebut sesuai dengan ciri penting dari suatu daerah otonomi yang mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya yaitu terletak pada strategi sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan daerah (Soedjono 2000).

Pemerintah Kota (PEMKOT) Makassar merupakan salah satu Pemerintahan Daerah di Sulawesi Selatan yang diharuskan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan tersebut berpedoman pada ketentuan pokok yang menyangkut pengelolaan keuangan dan otonomi daerah serta peraturan pelaksanaannya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam penerapannya diperkuat oleh peraturan daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penting dilakukan riset terkait **“Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah Kota Makassar “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana efektivitas anggaran berbasis kinerja dalam menilai kinerja Keuangan pemerintah daerah Kota Makassar ?”

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan, Adapun tujuan penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui efektivitas anggaran berbasis kinerja dalam menilai kinerja Keuangan pemerintah daerah Kota Makassar”.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dilakukan dengan harapan bahwa penelitian ini dapat memberi manfaat bagi peneliti maupun orang lain. Hasil ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam berbagai hal, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam penentuan pengelolaan keuangan, serta referensi yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja dalam menilai kinerja keuangan pemerintah kota makassar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah Pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan akuntansi pemerintahan serta pengalaman dalam hal meneliti.

b. Bagi Pemerintah Kota Makassar

Sebagai informasi sebagai tambahan referensi dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah setelah diberlakukannya anggaran berbasis kinerja.

c. Bagi Penulis Selanjutnya

Berguna sebagai informasi dan masukan untuk penelitian yang akan datang yang membahas topik permasalahan yang sama.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Keuangan Daerah

1. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan daerah yang berlaku. Dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 dinyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dari uraian tersebut dapat di ambil kata kunci dari keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi atau sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah.

2. Ruang Lingkup keuangan daerah

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

- a) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi serta melakukan pinjaman
- b) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
- c) Penerimaan daerah

- d) Pengeluaran daerah
- e) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah
- f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah atau kepentingan umum.

3. Azas umum pengelolaan keuangan daerah

Keuangan daerah dikelola dengan azas tertentu. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Berikut ini adalah uraian terhadap azas umum pengelolaan keuangan daerah tersebut :

a) Tertib

Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawakan.

b) Taat pada peraturan perundang-undangan

Keuangan daerah dikelola dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

c) Efektif

Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

d) Efisien

Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

e) Ekonomis

Pemerolehan masukan (*input*) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

f) Transparan

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

g) Bertanggungjawab

Perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

h) Keadilan

Keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

i) Kepatuhan

Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

j) Manfaat

Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

B. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

1. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan pencapaian semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang dapat dijadikan kekayaan daerah dalam periode tertentu. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi organisasi. Dalam organisasi sektor publik, setelah adanya operasional anggaran, langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. "Akuntabilitas yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance* bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien" (Mardiasmo 2002:121).

Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi merupakan perbandingan *ouput/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. "Sedangkan efektif merupakan tingkat standar kinerja atau program dengan target yang telah ditetapkan yang merupakan perbandingan-perbandingan *outcome* dengan *output*" (Mardiasmo, 2002:4).

2. Kinerja Keuangan Berdasarkan LAKIP

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ada kewajiban setiap instansi pemerintah untuk menyusun dan melaporkan Pensekemaan Strategi tentang program-program utama yang akan dicapai selama satu sampai

dengan lima tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi dan jajarannya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan fungsi instansi. LAKIP tersebut sama sekali tidak menyinggung mengenai peran laporan keuangan instansi yang seharusnya menjadi dasar penyusunan LAKIP, padahal seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah bermuara pada keuangan/pendanaan.

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari pusat, Pemerintah Daerah kabupaten/Kota. Adapun penanggungjawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Selain itu, penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip yang lazim, yaitu laporan harus disusun secara, objektif, dan transparan. Disamping itu, perlu diperhatikan prinsip-prinsip lain:

- 1) Prinsip pertanggungjawaban (adanya responsibility center), sehingga lingkungannya jelas. Hal-hal yang dikendalikan (controllable) oleh pihak yang melaporkan harus dapat dimengerti pembaca laporan.
- 2) Prinsip pengecualian, yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambil keputusan dan pertanggung jawaban instansi yang bersangkutan. Misalnya, hal-hal yang menonjol baik keberhasilan maupun kegagalan, perbedaan antara realisasi dengan

target/standar/budget, penyimpangan dari skema karena alasan tertentu dan sebagainya.

- 3) Prinsip manfaat , yaitu manfaat laporan harus lebih besar dari pada biaya penyusunan.

Isi dari LAKIP adalah uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama instansi pemerintah. Selain itu perlu dimasukkan juga beberapa aspek pendukung meliputi uraian pertanggungjawaban mengenai:

- a. Aspek keuangan
- b. Aspek sumber daya
- c. Aspek sarana dan prasarana

- 4) Metode kerja, pengendalian manajemen, dan kebijaksanaan lain yang mendukung pelaksanaan tugas instansi. Agar LAKIP dapat lebih berguna sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka bentuk dan isinya diseragamkan tanpa mengabaikan keunikan masing-masing instansi pemerintah.

Penyeragaman ini paling tidak dapat mengurangi perbedaan cara penyajian yang cenderung menjauhkan pemenuhan persyaratan minimal akan informasi yang seharusnya dimuat dalam LAKIP. Penyeragaman juga dimaksudkan untuk pelaporan yang bersifat rutin, sehingga perbandingan atau evaluasi dapat dilakukan secara memadai. LAKIP dapat dimasukkan pada kategori laporan rutin, Karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali. Dan juga agar pengungkapan

akuntabilitas aspek-aspek pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tidak tumpang tindih dengan pengungkapan akuntabilitas kinerja, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Uraian pertanggungjawaban keuangan dititikberatkan pada perolehan dan penggunaan dana, baik dana yang berasal dari dana alokasi APBD (rutin maupun pembangunan) maupun dana yang berasal dari PNBP (penerimaan Negara bukan pajak).
- b. Uraian pertanggungjawaban sumber daya manusia, dititikberatkan pada penggunaan dan pembinaan dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil atau manfaat, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- c. Uraian mengenai pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana dititik beratkan pada pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangannya.
- d. Uraian tentang metode kerja, pengendalian manajemen dan kebijaksanaan lainnya, difokuskan pada manfaat atau dampak dari suatu kebijaksanaan yang merupakan cerminan pertanggungjawaban kebijaksanaan (*policy accountability*).

3. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2010) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dalam tiga bagian yaitu:

1) Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dapat terlihat dari realisasi pendapatan dan anggaran. Apabila realisasi melebihi anggaran yang telah dibuat maka kinerja pemerintah daerah dinilai baik.

Berdasarkan realisasi anggaran, dapat dilakukan Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dengan cara:

a. Analisis Varians Pendapatan Daerah

Analisis Varians Pendapatan Daerah dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis Kinerja Keuangan Pendapatan. Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dikatakan memiliki Kinerja Keuangan Pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Sebaliknya, apabila realisasi pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena seharusnya demikian. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan diantisipasi (*unfavourable variansce*). Berikut ini rumus untuk menghitung Analisis Varians Pendapatan Daerah:

$$\text{Analisis Varians} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Tahun } t}{\text{Anggaran Pendapatan Tahun } t} \times 100\%$$

b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan

APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (*trend*) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah. Pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi. Selain mempertimbangkan faktor inflasi, penetapan target pertumbuhan pendapatan juga harus mempertimbangkan asumsi anggaran yang lain, misalnya kurs rupiah, harga minyak, dan sebagainya. Berikut ini rumus untuk Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah:

Pertumbuhan Pendapatan Tahun $t =$

$$\frac{\text{Pend. Tahun } t - \text{Pend. Tahun } (t-1)}{\text{Pend. Tahun } (t-1)} \times 100\%$$

c. Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah

1. Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Berikut ini rumus untuk menghitung Derajat Desentralisasi:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah Pendapatan Transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah propinsi. Berikut ini rumus untuk menghitung Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah:

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah =

$$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio Efektifitas Pajak Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektifitas pajak dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka 100 persen, untuk dapat menghitung Rasio Efisiensi Pajak Daerah diperlukan data tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Kinerja Keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari sepuluh persen. Berikut ini rumus untuk menghitung Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah:

Rasio Efektifitas Pajak Daerah =

$$\frac{\text{Realisasi Pend. Pajak Daeran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efektifitas Pajak Daerah =

$$\frac{\text{Biaya Pemerolehan Pajak Daerah} \times 100\%}{\text{Realisasi Pajak Daerah}}$$

4. Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung Pendapatan Daerah.

Berikut ini rumus untuk menghitung Derajat Kontribusi BUMD:

Derajat Kontribusi BUMD =

$$\frac{\text{Pendapatan Bagian Laba BUMD} \times 100\%}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

2) Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah

Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dilakukan untuk mengevaluasi apakah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kinerja Keuangan Belanja Daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dapat dilakukan dengan cara:

a. Analisis Varians Belanja Daerah

Analisis ini merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi dengan anggaran. Selisih dalam analisis ini dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu: selisih disukai dan selisih tidak disukai. Selisih disukai terjadi saat realisasi belanja lebih kecil dari anggaran, sedangkan selisih yang tidak disukai terjadi jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya. Selisih yang signifikan akan memiliki dua kemungkinan, pertama dapat diartikan jika telah terjadi efisiensi anggaran. Kedua dapat diartikan sebaliknya, ini

terjadi jika selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi kurang tepat.

$$\text{Analisis Varians} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t}{\text{Anggara Belanja Tahun } t} \times 100\%$$

b. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Belanja Daerah sendiri biasanya memiliki kecenderungan untuk naik, kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan inflasi dan perubahan nilai tukar rupiah.

Pertumbuhan Belanja Tahun t=

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t - \text{Realisasi Belanja Tahun } t-1}{\text{Realisasi Tahun } t} \times 100\%$$

c. Analisis Keserasian Belanja Daerah

Analisis Keserasian Belanja Daerah menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya ada belanja secara optimal. Hal ini terkait anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Supaya fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis Keserasian Belanja Daerah antara lain berupa:

1) Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Rasio ini memberi informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi adalah belanja yang manfaatnya dapat habis dikonsumsi dalam

satu tahun anggaran. Pada umumnya, pemerintah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung akan memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah dengan pendapatan rendah. Penyebabnya adalah pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi sehingga pemerintah daerah tersebut cenderung melakukan belanja yang bersifat jangka pendek.

Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

$$= \frac{\text{Realisasi Operasi Belanja}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

2) Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui proporsi Belanja Daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal dalam tahun anggaran bersangkutan. Sifat dari belanja ini adalah jangka menengah dan panjang, selain itu belanja modal tidak rutin. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan rendah biasanya akan memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi. Penyebab terjadinya adalah pemerintah daerah yang memiliki tingkat pendapatan rendah akan berorientasi untuk melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang.

Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja =

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Modal}}$$

d. Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Rasio ini berguna untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah di nilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}}$$

C. Anggaran Berbasis Kinerja

1. Pengertian Anggaran

Mardiasmo (2011:61) menjelaskan, bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Bastian (2010:164) mengemukakan, bahwa anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Anggaran merupakan alat untuk mencegah informasi asimetri dan perilaku disfungsional dari agen atau pemerintah daerah serta merupakan proses akuntabilitas publik. Akuntabilitas melalui anggaran meliputi penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran. Selain itu, anggaran merupakan elemen penting dalam system pengendalian manajemen karena anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi,

evaluasi kinerja dan motivasi. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah, menjadi relevan dan penting.

2. Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja (*Performance based budgeting*) pada dasarnya adalah sebuah system penganggaran yang berorientasi pada *output*. Halim (2012:177) menyatakan, bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja. Bastian (2010:171) mengemukakan, bahwa anggaran berbasis kinerja adalah system penganggaran yang berorientasi pada "*output*" organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi

Menurut Kepmendagri No.29 tahun 2002 pengertian anggaran berbasis kinerja adalah:

- a. Suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.
- b. Didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Anggaran dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan.
- c. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan *value for money* dan efektifitas anggaran.

d. Anggaran kinerja merupakan system yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur (*indicator*) kinerja sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran program.

Berdasarkan pengertian anggaran berbasis kinerja menurut Bastian, komponen-komponen visi, misi dan rencana strategi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian penyusunan anggaran berbasis kinerja membutuhkan suatu sistim administrasi publik yang telah ditata dengan baik, konsisten dan terstruktur sehingga kinerja anggaran dapat dicapai berdasarkan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan. Melalui pengukuran kinerja, manajemen dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu unit organisasi dalam pencapaian sasaran dan tujuan untuk selanjutnya memberikan penghargaan (*reward*) untuk keberhasilan atau hukuman (*punishment*) untuk kegagalan.

3. Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam buku 2 pedoman penerapan penganggaran berbasis Kinerja (2009: 20), langkah-langkah pokok penerapan anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rencana Strategi
- b. Sinkronisasi
- c. Penyusunan Kerangka Acuan
- d. Perumusan/penetapan Indikator Kinerja
- e. Pengukuran kinerja
- f. Pelaporan kinerja

D. Tinjauan Empiris

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini diantaranya Komang Sri Endrayani, Made Pradana Adiputra, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) yang meneliti tentang “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Mandang Gabriel Anton Jantje J. Tinangon, Inggriani Elim (2016) telah melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja untuk Menunjang Akuntabilitas Publik pada Badan Lingkungan Hidup Kota Manado”. Penelitian tersebut menemukan bahwa Badan Lingkungan Hidup kota Manado telah melakukan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang bertujuan untuk menunjang akuntabilitas publik secara baik dan benar sesuai dengan UU No.17 tahun 2003.

Anita Wahyu Wijayanti, Mujibur Rahman Khairul Muluk, Ratih Nurpratiwi (2012) telah melakukan penelitian tentang “Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usulan program dan kegiatan melalui proses musrenbang berpotensi menciptakan rencana program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi usulan program dan kegiatan pembangunan dari masyarakat tidak bisa terakomodir semuanya dikarenakan masyarakat kurang mendapatkan

informasi program pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah daerah tahun bersangkutan.

Taufik Kurrohman (2013) melakukan penelitian tentang "Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja melalui Kinerja Keuangan yang Berbasis Value For Money di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur". Dalam penelitian ini penulis ingin menguji kinerja keuangan pemerintah daerah setelah menggunakan anggaran berbasis kinerja dengan pendekatan value for money. Dengan melakukan uji beda sebelum menggunakan anggaran berbasis kinerja dengan sesudah menggunakan anggaran berbasis kinerja. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah daerah lebih ekonomis dan efisiensi dalam pengelolaan keuangannya setelah menggunakan anggaran berbasis kinerja.

Rolly Yandra & Endang Sutrisna (2013) telah melakukan penelitian tentang "Penyusunan APBD Berbasis Kinerja". Untuk menguji hipotesis pengaruh komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan yang jelas dan hukuman/sanksi yang tegas berpengaruh terhadap APBD berbasis kinerja secara simultan dan parsial digunakan uji F dan uji t. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan yang jelas dan hukuman/ sanksi yang tegas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap APBD berbasis kinerja.

Muh. Irfan, Budi Santoso, Lukman Effendi (2016) telah melakukan tentang "Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Asimetri Informasi, Penekanan Anggaran dan Komitmen

Organisasional sebagai Variabel Pemoderasi”. Metode analisis menggunakan SEM berbasis varian SmartPLS Versi 2.0 M3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap anggaran kendur. Penelitian ini dapat membuktikan adanya interaksi dengan anggaran asimetri informasi partisipasi, penekanan anggaran memiliki efek negatif yang signifikan, sedangkan organisasi Komitmen secara signifikan mempengaruhi kelonggaran anggaran.

Seto Wibisono, Ikhsan Budi Riharjo (2016) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner yang dibagikan kepada para responden. Analisa data menggunakan model analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel yakni perencanaan anggaran, implementasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Febrina Astria Verasvera (2016) telah melakukan penelitian tentang “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptifmetode dengan pendekatan studi kasus, dan pengujian hipotesis menggunakan Rank Spearman Analisis korelasi untuk mengetahui variabel korelasi X (Budgeting based Kinerja) dan Variabel Y (Kinerja Aparatur Daerah). Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y, menggunakan koefisien determinasi. Hal ini ditunjukkan pada hasil korelasi Rank Spearman $r_s = 0,6956$ dan interval dari 0,60-0,79 yang menunjukkan tingkat asosiasi yang kuat juga Sebagai hasil pengujian

hipotesis maka hasilnya menunjukkan bahwa $t_{hitung} 7.1150 > t_{tabel} 1.6707$. Hal itu membuat indikasi penolakan terhadap H_0 yang menandakan hal itu ada adalah hubungan positif antara variabel X dengan variabel Y dan untuk koefisien determinasi yang menunjukkan banyak pengaruh penganggaran berdasarkan kinerja terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah yang diperoleh Hasilnya adalah 48,39% sedangkan 51,61% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Sehingga diharapkan semua itu pejabat di Dinas Sosial mampu melaksanakan penganggaran berdasarkan kinerja lebih baik.

Hasri Raka Sahri (2016) telah melakukan penelitian tentang “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru”. Sampelnya digunakan sebagai Responden diambil dengan menggunakan metode sampling proposif. Sebagian Hasil penelitian menemukan bahwa variabel kinerja berbasis anggaran dan Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Wiwik Andriani Ermataty Hatta (2012) telah melakukan penelitian tentang “Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Pusat (Studi pada Politeknik Negeri)” Hasil penelitian ini membuktikan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi, penganggaran belum didasarkan pada prioritas, kekurangannya dana dan tidak tersedianya indikator kinerja yang jelas untuk setiap aktivitas.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis/Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Komang Sri Endrayani, Made Pradana Adiputra, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014)	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Akuntabilitaskinerja, Anggaran berbasis kinerja, Dinas Kehutanan	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2	Mandang Gabriel Anton Jantje J. Tinangon, Inggriani Elim (2016)	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Penerapan Anggaran Berbasis kinerja, Perencanaan Anggaran, Implementasi Anggaran, Pertanggungjawaban anggaran, Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel yakni perencanaan anggaran, implementasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3	Anita Wahyu Wijayanti, Mujibur Rahman Khairul Muluk, Ratih Nurpratiwi (2012)	Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan	Anggaran berbasis kinerja, Musrenbang, Perencanaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa usulan program dan kegiatan melalui proses musrenbang berpotensi menciptakan rencana program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4	Rolly Yandra & Endang Sutrisna (2013)	Penyusunan APBD Berbasis Kinerja	Komitmen Organisasi, Sistem Administrasi,	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa komitmen dari seluruh komponen

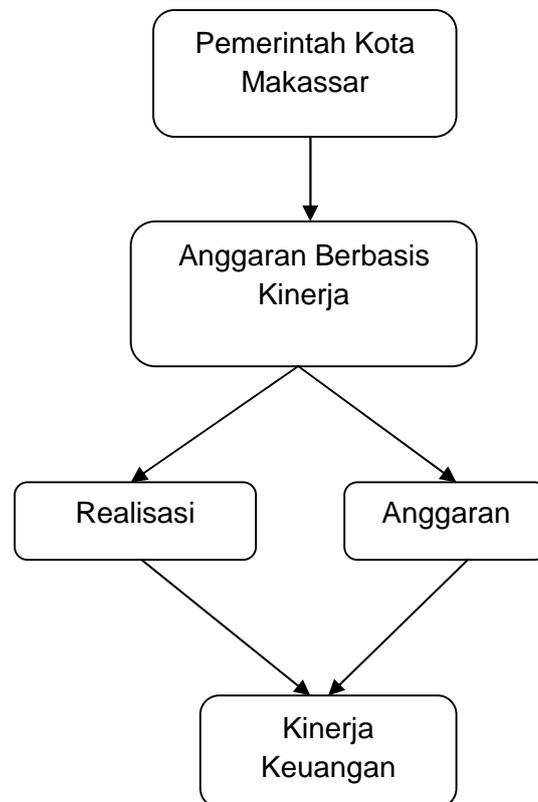
			APBD berbasis kinerja	organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan yang jelas dan hukuman/ sanksi yang tegas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap APBD berbasis kinerja.
5	Taufik Kurrohman (2013)	Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja melalui Kinerja Keuangan yang Berbasis Value For Money di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur	Penganggaran Berbasis Kinerja, Nilai Uang, Kinerja Keuangan	. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah daerah lebih ekonomis dan efisien dalam pengelolaan keuangannya setelah menggunakan anggaran berbasis kinerja.
6	Seto Wibisono, Ikhsan Budi Riharjo (2016)	Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja untuk Menunjang Akuntabilitas Publik pada Badan Lingkungan Hidup Kota Manado	Anggaran, Anggaran berbasis kinerja, Akuntabilitas public.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Lingkungan Hidup kota Manado telah melakukan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang bertujuan untuk menunjang akuntabilitas publik secara baik dan benar sesuai dengan UU No.17 tahun 2003.
7	Muh. Irfan, Budi Santoso, Lukman Effendi (2016)	Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Asimetri Informasi,	Partisipasi Anggaran; Asimetri Informasi; Penekanan Anggaran; Komitmen berorganisasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap anggaran kendur. Penelitian ini dapat membuktikan adanya interaksi dengan anggaran

		Penekanan Anggaran dan Komitmen Organisasional sebagai Variabel Pemoderasi		asimetri informasi partisipasi, penekanan anggaran memiliki efek negatif yang signifikan, sedangkan organisasi Komitmen secara signifikan mempengaruhi kelonggaran anggaran
8	Febrina Astria Verasvera (2016)	Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	Anggaran Kinerja	Hal ini ditunjukkan pada hasil korelasi Rank Spearman $r_s = 0,6956$ dan interval dari $0,60-0,79$ yang menunjukkan tingkat asosiasi yang kuat juga. Sebagai hasil pengujian hipotesis maka hasilnya menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 7,1150 > t_{tabel} = 1,6707$. Hal itu membuat indikasi penolakan terhadap H_0 yang menandakan hal itu ada adalah hubungan positif antara variabel X dengan variabel Y dan untuk koefisien determinasi yang menunjukkan banyak pengaruh penganggaran berdasarkan kinerja terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah yang diperoleh. Hasilnya adalah $48,39\%$ sedangkan $51,61\%$ dipengaruhi oleh faktor lainnya. Sehingga diharapkan semua

				itu pejabat di Dinas Sosial mampu melaksanakan penganggaran berdasarkan kinerja lebih baik.
9	Hasri Raka Sahri (2016)	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru	Penganggaran, Pengendalian, Kinerja Keuangan	Sebagian Hasil penelitian menemukan bahwa variabel kinerja berbasis anggaran dan Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
10	Wiwik Andriani Ermataty Hatta (2012)	Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Pusat (Studi pada Politeknik Negeri.	Pelaksanaan penganggaran, PNP, UU dari 17 thn 2003	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi, penganggaran belum didasarkan pada prioritas, kekurangannya dana dan tidak tersedianya indikator kinerja yang jelas untuk setiap aktivitas.

E. Kerangka Konsep

Adapun faktor yang berhubungan dengan anggaran berbasis kinerja adalah realisasi, anggaran dan kinerja keuangan. Namun tidak semua variabel diteliti dalam penelitian ini, dengan pertimbangan kepentingan peneliti dilapangan, Keterbatasan kemampuan dan waktu peneliti. Peneliti hanya meneliti beberapa variabel saja yaitu laporan keuangan dan anggaran berbasis kinerja, maka kerangka konsep sertavariabel dalam penelitian ini secara sistematis dapat digunakan sebagai berikut :



Bagan 2.1

Kerangka Pemikiran

F. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja efektif digunakan dalam menilai kinerja Keuangan pemerintah daerah Kota Makassar.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, dan sistem pemikiran. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki. (Nazir, 2009:23).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar yang terletak di Jl. Jend. Ahmad Yani No.2, Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90171. Penelitian ini direncanakan selama kurang lebih dua bulan, yaitu dari bulan April-Mei tahun 2018.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan karakteristik dari objek dalam elemen-elemen yang dapat diobservasi yang menyebabkan konsep dapat diukur dan dioperasionalkan dalam penelitian (Erlina, 2008:11). Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pelaksanaan penelitian ini, maka perlu diberikan definisi variabel operasional yang akan diteliti. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Anggaran Berbasis Kinerja sementara variabel dependen dari penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Makassar.

Tabel 3.2
Definisi Operasional variabel dan skala pengukuran

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Anggaran Berbasis Kinerja (X)	Sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kinerja atau keluaran (output) dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan. Dengan demikian diharapkan penyusunan dan pengalokasian anggaran dapat lebih disesuaikan dengan skala prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan	Realisasi Anggaran dan Belanja daerah
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang dituangkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang baik secara langsung maupaun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.	Petumbuhan Kinerja Keuangan

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu data laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar.

Sampel yang di ambil dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan berupa neraca seperti laporan realisasi anggaran (LRA) dan perubahan saldo anggaran lebih, dan laporan finansial pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar dari tahun 2013 sampai 2017.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, Bentuk metode ini merupakan pengamatan secara langsung pada keadaan yang sebenarnya di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar.
2. Teknik wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung secara lisan dengan beberapa pihak yang berkompeten dan berwenang dalam memberikan data yang dibutuhkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar.
3. Teknik dokumentasi dalam hal ini penulis mengumpulkan data sekunder melalui pengambilan data yang ada di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar. serta dengan cara mencari data yang telah ada di beberapa website yang mengandung materi bahan mengenai laporan ataupun kondisi keuangan Pemerintah Kota Makassar.

F. Teknik Analisis

Pemerintah daerah dikatakan memiliki Kinerja Keuangan Pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Sebaliknya, apabila realisasi pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Maka rumus yang digunakan untuk menghitung Analisis Varians Pendapatan Daerah adalah :

$$\text{Analisis Varians} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Tahun } t}{\text{Anggaran Pendapatan Tahun } t} \times 100\%$$

Menurut Mahsun dalam Sumenge (2013) tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja, Kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja sebagai berikut:

- a. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif
- b. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif
- c. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif
- d. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif
- e. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Kinerja pemerintah dikatakan efektif apabila rasio antara 90,01% s/d 100%, semakin tinggi rasio efektivitas berarti kinerja akan semakin baik dan semakin rendah rasio efektivitas berarti semakin buruk (Yunianti, 2015). Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran penerimaan dengan target anggaran penerimaan. Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Sangat efektif : >100%
- b. Efektif : 100%
- c. Cukup efektif : 90%-99%
- d. Kurang efektif : 75%-89%
- e. Tidak efektif : <75%

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar

Kota Makassar kadang dieja *Macassar*, *Mangkasar*, dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai ujung pandang, adalah kota terbesar dikawasan Indonesia Timur dan sekaligus ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota ini terletak di pesisir barat daya pulau Sulawesi, berhadapan dengan Selat Makassar.

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km².

Berdasarkan peaturan daerah nomor 7 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2009 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah kota Makassar. Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset (BPKA) kota Makassar merupakan salah satu unsur staf yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota.

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) :

“Mewujudkan APBD yang berkualitas menuju opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 2019”.

Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) :

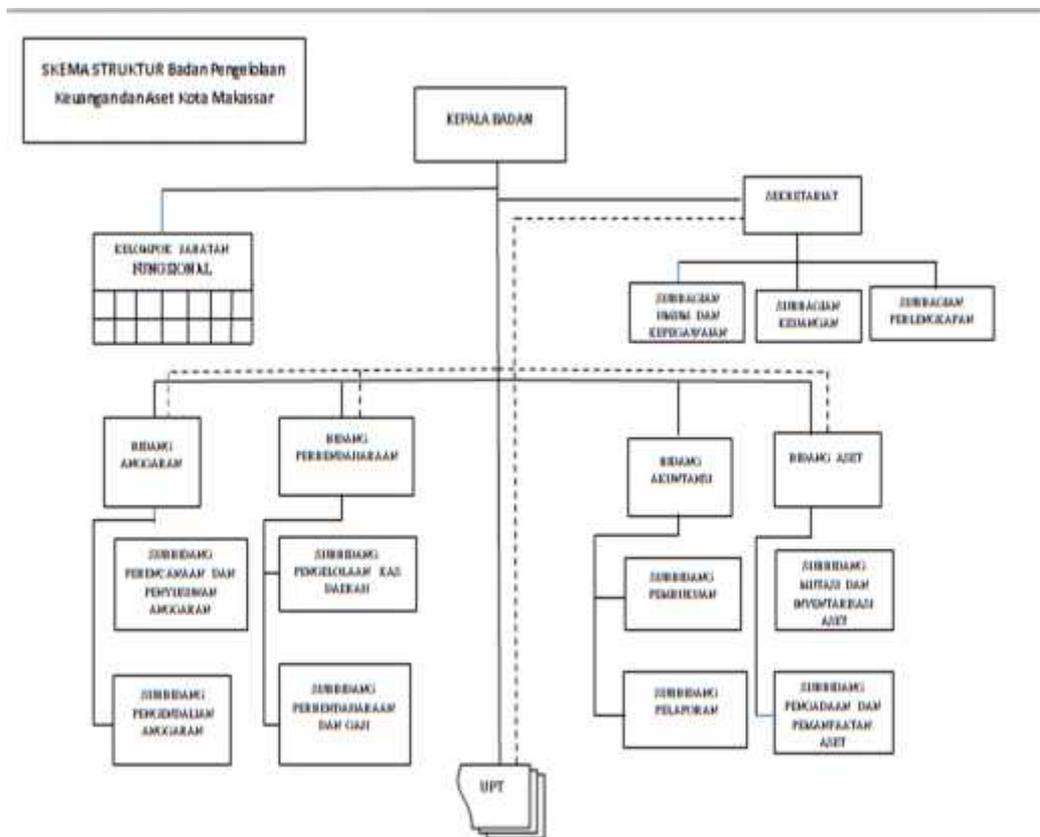
1. Menciptakan kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan dan tepat waktu.
2. Meningkatkan Akurasi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
3. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah menuju opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
4. Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah yang profesional dan modern.
5. Meningkatkan sarana, prasarana dan SDM dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah kota Makassar dan Peraturan Walikota Makassar No 12 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Organisasi Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar terdiri dari: 1 (Satu) Kepala Badan, 1 (satu) sekretaris, 4 (empat) kepala bidang, 3 (tiga) kepala sub bagian, dan 8 (delapan) kepala sub bidang. Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar, disajikan pada Bagan 1 sebagai berikut:

Bagan 1
Struktur Organisasi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar



Badan Pengelolaan Keuangan dan aset dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan Mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Keuangan Daerah, berdasarkan pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, dan
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2).
9. Peraturan Walikota Makassar No 12 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Secara lengkap, struktur organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Sekretaris

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan
- c. Kepala Sub Bagian Perlengkapan

3. Kepala Bidang Anggaran

- a. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
- b. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran

4. Kepala Bidang Perbendaharaan

- a. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
- b. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Gaji

5. Kepala Bidang Akuntansi

- a. Kepala Sub Bidang Pembukuan
- b. Kepala Sub Bidang Pelaporan

6. Kepala Bidang dan Aset

- a. Kepala Sub Bidang Mutasi dan Inventarisasi Aset
- b. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Aset.

Adapun tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar yang dipimpin oleh Kepala Badan dan dibantu jajaran struktural, sebagai berikut :

a. Sekretasis

Secara umum tugas pokok Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di

lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengelolaan ketatausahaan Badan
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian Badan
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan Badan
- 4) pelaksanaan urusan perlengkapan Badan
- 5) Pelaksanaan urusan umum dan rumahtangga Badan
- 6) Pelaksanaan koordinasi perumusan program kerja dan rapat kerja Badan.

b. Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam urusan penyusunan anggaran, administrasi anggaran dan pembiayaan dan investasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Anggaran menyelenggarakan Fungsi:

- 1) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Anggaran
- 2) Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Anggaran
- 3) Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 4) Pelaksanaan kebijakan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah.
- 5) Penyusunan KUA dan PPAS beserta perubahannya.

- 6) Pengkoordinasian penyusunan standar harga dan analisis standar belanja daerah.
- 7) Melaksanakan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD.
- 8) Penyusunan perencanaan anggaran kas dan menetapkan SPD.
- 9) Pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan daerah dan kebijakan pengelolaan anggaran.
- 10) Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dan pelaksanaan pembiayaan dan investasi daerah.
- 11) Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan pembiayaan dan investasi.
- 12) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 13) Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

c. Kepala Bidang Perbendaharaan

Kepala bidang perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam pengelolaan perbendaharaan umum daerah, perbendaharaan belanjadan verifikasi bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Perbendaharaan.
- 2) Perumusan bahan/ data dan informasi untuk menyusun program pembangunan di bidang perbendaharaan.

- 3) Pelaksanaan penerbitan SP2D.
- 4) Pelaksanaan pemantauan penerimandan pengeluaran APBD oleh Bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.
- 5) Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
- 6) Pelaksanaan penyimpangan uang daerah dan penempatan uang daerah.
- 7) Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
- 8) Pengkoordinasian pelaksanaan kewajiban perpajakan.
- 9) Penyusunan kebijakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan umum daerah, belanja dan verifikasi kelengkapan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah.
- 10) Pelaksanaan penyusunan peraturan pelaksanaan dan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 11) Pelaksanaan verifikasi dan meneliti kelengkapan administrasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 12) Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

d. Kepala Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi memiliki tugas pokok menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang piutang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya dalam rangka

menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Akuntansi.
- 2) Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan akuntansi daerah.
- 3) Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
- 4) Pelaksanaan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
- 5) Pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
- 6) Melaksanakan pengelolaan hutang dan piutang daerah.
- 7) Penyelenggaraan evaluasi laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 8) Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

e. Kepala Bidang Aset

Kepala bidang aset memiliki tugas pokok yaitu mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi mutasi aset dan inventarisasi serta pemanfaatan dan pemberdayaan aset.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Aset menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Aset.
- 2) Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang.
- 3) Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya.
- 4) Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi mutasi aset dan inventarisasi serta pemanfaatan dan pemberdayaan aset.
- 5) Pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan bahan kebijakan umum dan teknis rencana kebutuhan aset daerah, penelitian dan pengkajian kebutuhan barang daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang, mengikuti pelaksanaan pelelangan barang dan bangunan, pelaksanaan administrasi barang daerah, penilaian dan penyusutan aset daerah, pencatatan barang milik daerah, inventarisasi data aset daerah, penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah serta pelaksanaan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali.
- 6) Pelaksanaan penyusunan pedoman petunjuk teknis pemanfaatan dan pengendalian kekayaan daerah, evaluasi daftar hasil pengadaan barang daerah, pemantauan dan pengawasan kepemilikan aset daerah serta dokumentasi kepemilikan aset berupa kendaraan, tanah, dan bangunan.
- 7) Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait.

- 8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya
- 9) Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

2. Sumber Daya BPKA

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset. Data pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar berjumlah orang posisi tanggal 7 April 2014 dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 1. Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Total Orang
1	Golongan I	1	-	1
2	Golongan II	4	6	10
3	Golongan III	13	13	26
4	Golongan IV	3	1	4
Total		21	20	41

Tabel 2. Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total Orang
1	SD. SLTP	-	-	-
2	SLTA	2	2	4
3	Sarjana Muda/ D III	1	-	1
4	Sarjana (S1)	11	12	23
5	Master (S2)	7	6	13
6	Doktor (S3)	-	-	-
Total		21	20	41

Sumber : Sub Bagian Umum & Kepagawaian BPKA

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai instansi pemerintah kota Makassar menempati gedung kantor di Balaikota. Gedung kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset terletak di jalan

Jenderal Ahmad Yani 2 Makassar yang ditempati oleh Kepala Badan selaku Bendahara Umum Daerah, Sekretaris, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, Bidang Aset.

3. Kinerja Pelayanan BPKA

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja pengelolaan keuangan dan aset kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar masih terbilang SKPD yang baru itu kinerja pelayanan yang akan kami capai yang terdiri :

1. Penyusunan APBD yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Akurasi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
3. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang sistematis, akuntabel dan terstruktur.
4. Pengelolaan barang milik daerah yang profesional dan modern.
5. Meningkatkan kapasitas organisasi pengelolaan keuangan dalam hal ini SDM, sarana dan prasarana aparatur BPKA.

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKA

Yang menjadi tantangan pelayanan Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Kota Makassar adalah:

1. Sinergitas APBD dengan dokumen perencanaan secara terpadu dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Meningkatkan akurasi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
3. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang meraih opini BPK wajar tanpa pengecualian (WTP).
4. Pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Makassar yang tertib atau sesuai dengan SOP pengelolaan aset daerah.
5. SDM, sarana dan prasarana yang memadai bagi aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar.

Peluang pengembangan pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar yaitu :

1. Penyelenggaraan penyusunan APBD yang sesuai dengan dokumen perencanaan.
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh BPKA selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) sudah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) yang ada dan telah diverifikasi serta diteliti oleh PPK SKPD.
3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sesuai dengan PP 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
4. Melakukan koordinasi dalam peningkatan pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah.

5. Menciptkan aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang handal didukung oleh fasilitas dengan segala penunjangnya.

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2014-2016

Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah pada Kota Makassar secara umum menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dikatakan baik, tetapi masih kurang dalam penyelenggaraan desentralisasi dan terdapat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, serta dalam pemungutan pajak daerah belum efisien.

a. Analisis Varians Pendapatan Daerah

Analisis Varians Pendapatan Daerah dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan untuk membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis Kinerja Keuangan Pendapatan. Jika terdapat selisih lebih (realisasi pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan) maka dikatakan memiliki Kinerja Keuangan Pendapatan yang baik, sedangkan jika terdapat selisih kurang (realisasi pendapatan kurang dari jumlah yang dianggarkan) maka Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dinilai kurang baik (Mahmudi, 2010). Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena seharusnya demikian. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (*favourable variansce*), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak

diharapkan (*unfavourable variansce*). Berikut adalah tabel perhitungan Varians Pendapatan Daerah:

Tabel 4.3
Analisis Varians Realisasi Pendapatan

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Selisih	Persentase Realisasi Anggaran	Ket.
2014	2.732.727.890.000	2.629.817.615.252	(102.910.274.748)	96,23%	Cukup Efektif
2015	3.221.742.911.000	2.952.609.910.737	(269.133.000.263)	91,65%	Cukup Efektif
2016	3.875.920.136.000	3.546.650.155.445	(329.269.980.555)	91,50%	Cukup Efektif
Total	9.830.390.937.00	9.129.077.681.434	(701.313.255.566)	92,87%	Cukup Efektif

Sumber : Data Olahan 2018

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa PEMKOT Makassar pada tahun 2014 memiliki tingkat presentase Realisasi Anggaran sebesar 96,23% dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan sebesar Rp 2.732.727.890.000 lebih besar dari yang terealisasi sebesar Rp 2.629.817.615.252 sehingga dapat dikategorikan cukup efektif. kemudian pada tahun 2015 PEMKOT Makassar mengalami penurunan sebesar 91,65%, dengan PAD yang dianggarkan sebesar Rp 3.221.742.911.000 dan Realisasi PAD sebesar Rp 2.952.609.910.737 dan termasuk dalam kategori cukup efektif, kemudian kembali menurun sebesar 91,50% pada tahun 2016 dengan Anggaran PAD sebesar Rp 3.875.920.136.000 dan Ralisasi PAD yaitu Rp 3.546.650.155.445 sehingga termasuk dalam kategori cukup efektif dengan hasil presentase

rata-rata sebesar Rp 92,87% yang cukup efektif juga. nilai persentase efektivitas pengelolaan keuangan daerah di PEMKOT Makassar selama 3 tahun periode anggaran cukup efektif, yaitu dengan hasil persentase keseluruhan nilai efektivitas yang menunjukkan nilai dibawah 100%. Maka semakin besar nilai efisiensi yang mendekati angka 100% atau lebih dari 100% menunjukkan tingkat efisiensi yang kurang baik dengan indikasi adanya kecenderungan pemborosan anggaran.

Sesuai dengan realisasi PAD PEMKOT Makassar juga semakin menurun, hal ini menjelaskan bahwa pengeluaran daerah pada tahun 2014 yang sempat mengakibatkan kurangnya efisiensi dalam pemanfaatan anggaran belanja daerah, namun memiliki efek jangka panjang yang tidak positif yaitu PEMKOT Makassar tidak berhasil meningkatkan realisasi PAD, yang mengindikasikan bahwa PEMKOT Makassar belum dikatakan mandiri, dalam arti tidak mampu mengelola daerahnya untuk meningkatkan sumber PADnya yang secara tidak langsung kegiatan perekonomian daerah tersebut juga tidak akan meningkat. secara keseluruhan terbukti bahwa PEMKOT Makassar cukup efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

b. Analisis Varians Belanja Daerah

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dan anggaran. Kinerja Keuangan pemerintah daerah dikatakan baik dan efisien jika terdapat selisih kurang (realisasi belanja kurang dari jumlah yang dianggarkan), sedangkan dikatakan tidak baik jika terdapat selisih lebih (realisasi belanja lebih dari jumlah yang dianggarkan). Rasio ini berguna untuk mengukur tingkat

penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah di nilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran. Berikut tabel Analisis Varians Belanja Daerah Kota makassar tahun 2014-2016 :

Tabel 4.4
Analisis Varians Belanja Daerah

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Selisih	Persentase Realisasi Anggaran	Ket.
2014	2.957.754.417.000	2.606.083.333.328	(351.671.083.671)	113,49%	Sangat Efektif
2015	3.475.894.752.000	3.062.274.393.637	413.620.358.363	113,50%	Sangat Efektif
2016	3.905.887.927.000	3.278.340.966.082	627.546.960.918	119,14%	Sangat Efektif
Total	10.339.537.096.000	8.946.698.047.000	1.3928.38.402.953	115,56%	Sangat Efektif

Sumber : Data Olahan 2018

Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Berdasarkan tabel 4.4 diatas, dari ketiga periode yang diteliti sebagian besar mengalami selisih yang diharapkan, hanya pada tahun 2014 mengalami selisih yang tidak diharapkan yaitu sebesar Rp 351.671.083.671. Secara umum dilihat dari Analisis Varians Belanja Daerah, Kinerja Keuangan PEMKOT makassar dapat dikatakan baik, ini

menunjukkan bahwa PEMKOT Makassar berhasil memanfaatkan anggaran belanjanya menjadi lebih efisien, karena kegiatan ekonomi pemerintah daerah telah berjalan lancar didukung dengan infrastruktur yang memadai, sehingga secara keseluruhan dari tahun 2014-2016 PEMKOT Makassar bisa dikatakan sangat efektif dalam mengelola anggaran keuangan daerah dengan menunjukkan adanya peningkatan tingkat efisiensi yang mengindikasikan telah dilakukan perbaikan kinerja oleh pemerintah. Namun dalam hal ini jika dilihat dari angka rata-rata persentase Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mencapai 115,68% . Presentase Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu 119,14%, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 113,49%, dari keseluruhan hasil presentase dapat dikategorikan sangat efektif, tetapi ketika lebih dari 100% maka akan mengindikasikan terjadinya pemborosan dalam penganggaran.

Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Analisis Varians menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan APBD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi penerimaan APBD maka dapat dikatakan efektif dan begitu pula sebaliknya.

C. Pembahasan

Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu kegiatan menganggarkan yang dilakukan oleh organisasi yang lebih menekankan pada output. Didalam suatu perencanaan kinerja instansi pemerintah, anggaran berbasis kinerja harus diterapkan dan menaati unsur-unsur yang mendasarinya. Yang mana unsur-unsur anggaran berbasis kinerja wajib dipahami dengan baik dalam pelaksanaannya oleh semua pihak yang terkait. Unsur-unsur pokok tersebut ada lima, antara lain pengukuran kinerja, penghargaan dan hukuman, kontrak kinerja, kontrol eksternal dan internal, serta pertanggungjawaban manajemen. Tercapainya tujuan anggaran berbasis kinerja, bila prosedur yang menjadi unsur dari anggaran berbasis kinerja benar-benar dilaksanakan.

Penganggaran dengan pendekatan kinerja berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi adalah sejauh mana perbandingan antara tingkat keluaran suatu kegiatan (*output*) diminimalkan dengan masukan yang digunakan (*input*) dimaksimalkan. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif. Tolak ukur keberhasilan sistem anggaran ini terletak pada prestasi dari tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat

memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan.

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Makassar merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/Pemerintah kota Makassar, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran pemerintah kota Makassar secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Makassar tahun Anggaran 2014-2016 pada tabel 4.3 dilihat dari Varians Pendapatan Daerah, secara umum dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini ditunjukkan dengan target realisasi anggaran pendapatan dari tahun 2014-2016 yang mencapai angka rata-rata 92,87%. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu mencapai 96,23%, sedangkan persentase terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 91,50% sehingga dapat dikategorikan cukup efektif dalam pengelolaan keuangan daerah kota makassar dikarenakan adanya efisiensi belanja yang telah dilakukan oleh seluruh SKPD maka anggaran tidak dapat tercapai secara maksimal 100%. Sedangkan jika dilihat dari tabel 4.4 Analisis Varians Belanja Daerah, mengalami selisih yang diharapkan, hanya pada tahun 2014 mengalami selisih yang tidak diharapkan yaitu sebesar Rp 351.671.083.671. Secara

umum dilihat dari Analisis Varians Belanja Daerah, Kinerja Keuangan pemerintah daerah kota makassar dapat dikatakan baik. ini menunjukkan bahwa PEMKOT Makassar berhasil memanfaatkan anggaran belanjanya menjadi lebih efisien, karena kegiatan ekonomi pemerintah daerah telah berjalan lancar didukung dengan infrastruktur yang memadai, sehingga secara keseluruhan dari tahun 2014-2016 PEMKOT Makassar bisa dikatakan sangat efektif dalam mengelola anggaran keuangan daerah dengan menunjukkan adanya peningkatan tingkat efisiensi yang mengindikasikan telah dilakukan perbaikan kinerja oleh pemerintah. Namun dalam hal ini jika dilihat dari angka rata-rata persentase Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mencapai 115,68%. Presentase Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu 119,14%, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 113,49%, maka ketika lebih dari 100% aka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa tingkat efektivitas anggaran berbasis kinerja dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah kota makassar efektif dilakukan dan mengalami peningkatan yang signifikan dalam lapoaran realisasi anggaran pendapan dan belanja daerah dari tahun 2014-2016. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika penerapan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan baik, maka semakin besar pula tingkat efektivitas kinerja instansi pemerintah. Serta mengindikasikan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota makassar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Makassar setelah adanya pelaksanaan sistem Anggaran Berbasis Kinerja. Dari analisa yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Makassar dari Varians Pendapatan Pemerintah Kota Makassar selama tahun anggaran 2014-2016, pada tabel 4.3 Analisis Varians realisasi pendapatan secara umum dapat dikatakan bahwa APBD dan realisasi tidak efektif karena selisih APBD dan realisasi mengalami tingkat tidak signifikan dengan hasil presentase APBD rata-rata 92,87%, kenapa tidak mencapai 100% dikarenakan adanya efisiensi belanja yang telah dilakukan oleh seluruh SKPD seperti misalnya dalam suatu lelang pembangunan fisik akan ada penawaran terendah namun hasil tetap sama. Sedangkan pada Analisis Varians belanja daerah mengalami selisih yang diharapkan hanya pada tahun 2014 mengalami selisih yang tidak diharapkan yaitu sebesar Rp 351.671.083.671 dengan presentase rata-rata 115,56%. Presentasae Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu 119,14%, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 113,49%. Namun dalam hal ini jika dilihat dari angka rata-rata persentase Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mancapai 115,68%. maka ketika lebih dari 100% aka mengindikasikan bahwa terjadinya pemborosan dalam anggaran. Hal ini ditunjukkan pada masa penerapan anggaran berbasis kinerja efektif

dan efisien dalam belanja yang dibuktikan dengan presentase efisiensi pada tiap tahun diatas 100%.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti coba berikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Makassar

- a. Agar lebih memaksimalkan pendapatan asli daerah dengan cara menambah dan menelusuri potensi daerah yang dapat menghasilkan penerimaan baik berupa pajak daerah maupun retribusi daerah.
- b. Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi objektif berdasarkan peraturan yang berlaku serta melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan PAD.
- c. Pemerintah Kota Makassar harus terus berupaya memaksimalkan alokasi pendapatan terhadap belanja pembangunan, karena belanja pembangunan inilah yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian mengenai Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja masih belum banyak dilakukan sehingga masih memerlukan penelitian lanjutan. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menambah tahun penelitian sehingga dapat diketahui lebih jelas dampak dari penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Anita Wahyu Wijayanti, Mujibur Rahman Khairul Muluk & Ratih Nurpratiwi. 2012. Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan. Vol. 15, No.3, (<http://www.wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/viewFile/237/210>, diakses 22 Januari 2018).
- Ahmad Yani. 2004. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta
- Febrina Astria Verasvera. 2016. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen*, (Online), Vol.15, No.2, (<http://journal.maranatha.edu/index.php/jmm/article/view/13/13/> , diakses 22 Januari 2018).
- Governance (Sinergi Masyarakat, Swasta, dan Pemerintah yang Berkeadilan), Vol. 2. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Hasri Raka Sahri Pembimbing: Restu Agusti dan Alazhar A. 2016. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. *JOM FEKON*, (Online), Vol. 3 No.1, (<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/viewFile/10213/9872>, diakses 22 Januari 2018).
- Indra Bastian. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi 4. Erlanga. Jakarta.
- Ira Halidayati. 2014. Pengaruh Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal.
- Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Made Pradana Adiputra, Nyoman Ari Surya Darmawan. 2014. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, (Online), Volume 2 No. 1, (<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/3390>, diakses 13 february 2017).
- Mandang Gabriel Anton 1 Jantje J. Tinangon2 Inggriani Elim. 2016. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Untuk Menunjang Akuntabilitas Publik Pada

Badan Lingkungan Hidup Kota Manado. Vol.4 No.3, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/14289>, diakses 22 Januari 2018).

Mohamad Mahsun. 2013. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Penerbit BPF: Yogyakarta.

Muh. Irfan, Budi Santoso & Lukman Effendi. 2016. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Asimetri Informasi, Penekanan Anggaran dan Komitmen Organisasional sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, (Online), Vol. 17 No. 2, (<http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/1434>, diakses 22 Januari 2018).

Rahmad Hidayat. 2015. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Akuntansi*. Universitas Negeri Padang. Padang. Vol.3, No.1.

Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika.

Rolly Yandra dan Endang Sutrisna. 2013. Penyusunan Apbd Berbasis Kinerja. *Jurnal Kebijakan Publik*, (Online), Volume 4, Nomor 2, (<https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/2202>, diakses 22 Januari 2018).

Sem Paulus Silalahi. 2012. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pemerintahan di Kota Dumai). *Jurnal Ekonomi*. Universitas Riau. Pekanbaru. Volume 20, Nomor 3.

Seto Wibisono, Ikhsan Budi Riharjo. 2016. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, (Online), Volume 5, Nomor 9, (<http://journal.maranatha.edu/index.php/jmm/article/view/13/13>, diakses 22 Januari 2018).

Taufik Kurrohman. 2013. Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value For Money Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, (Online), Vol. 5, No. 1, (<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda/article/view/2558>, diakses 22 Januari 2018).

Wiwik Andriani dan Ermataty Hatta. 2012. Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Pusat (Studi pada Politeknik Negeri Padang). *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, (Online), Vol 7 No.2, (<http://repo.polinpdg.ac.id/457/1/583>, diakses 22 Januari 2018).

Yulianti, umi. 2015. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa). Seminar Nasional ISBN 978-602-73690-3-0. Universitas PGRI Yogyakarta

**L
A
M
P
I
R
A
N**

DATA 2014

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Hal: 1

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.732.727.890.000,00	2.626.817.616.252,02	(102.910.274.747,97)	96,32
4.1	Pendapatan asli daerah	831.881.964.000,00	732.988.841.340,67	(98.893.122.659,33)	87,99
4.1.1	Pajak daerah	872.241.265.000,00	581.684.151.000,00	(290.557.049.000,00)	66,57
4.1.2	Retribusi daerah	127.968.150.000,00	155.778.884.720,00	27.810.734.720,00	108,10
4.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	12.833.810.000,00	11.838.644.183,20	(995.165.816,80)	92,45
4.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	18.268.000.000,00	31.697.987.559,81	13.429.987.559,81	172,53
4.2	Dana perimbangan	1.262.082.433.000,00	1.231.876.872.939,00	(30.205.560,00)	97,96
4.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil cukai pajak	72.430.111.000,00	88.429.871.939,00	16.000.000.000,00	122,07
4.2.2	Dana alokasi umum	1.114.852.212.000,00	1.114.852.212.000,00	-	100,00
4.2.3	Dana alokasi khusus	64.792.620.000,00	49.896.990.000,00	(14.895.630.000,00)	77,02
4.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	648.983.473.000,00	646.942.399.972,34	(2.041.073.027,66)	99,69
4.3.1	Roya	4.340.000.000,00	575.250.000,00	(3.764.750.000,00)	13,15
4.3.2	Dana budaya	-	-	-	-
4.3.3	Bagi hasil pajak dan provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	282.458.158.000,00	282.111.739.752,38	(346.418.247,62)	100,02
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Diteman Khusus	319.102.463.000,00	319.102.463.000,00	-	100,00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	63.182.852.000,00	63.182.863.240,00	1.011,00	100,02
	Jumlah Pendapatan	2.732.727.890.000,00	2.626.817.616.252,02	(102.910.274.747,97)	96,32
5	BELANJA DAERAH	2.957.794.417.000,00	2.608.083.303.328,28	(349.711.113.671,72)	88,19
5.1	Belanja Tidak Langsung	1.288.320.253.000,00	1.188.467.168.081,13	(99.853.084.918,87)	92,60
5.1.1	Belanja pegawai	7.226.604.741.000,00	1.141.896.474.817,00	(6.084.708.283,00)	15,66
5.1.2	Belanja bunga	2.032.849.000,00	1.667.227.181,19	(365.621.818,81)	81,98
5.1.3	Belanja subsidi	-	-	-	-
5.1.4	Belanja hibah	23.839.343.000,00	20.217.469.166,00	(3.621.873.834,00)	84,81
5.1.5	Belanja bantuan sosial	1.523.900.000,00	972.500.000,00	(551.400.000,00)	63,83
5.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Panti Sosial	888.700.000,00	873.430.000,00	(15.270.000,00)	98,28
5.1.8	Belanja tidak terduga	3.719.900.000,00	-	(3.719.900.000,00)	0,00
5.2	Belanja Langsung	1.669.474.164.000,00	1.440.616.135.247,15	(228.858.028.752,85)	86,30
5.2.1	Belanja pegawai	188.881.728.000,00	186.856.155.494,00	(1.925.572.506,00)	98,92
5.2.2	Belanja barang dan jasa	831.849.702.702,00	810.409.462.110,00	(21.440.240.592,00)	97,54
5.2.3	Belanja modal	578.000.734.662,00	483.280.544.701,23	(94.720.189.960,77)	83,61

Proses Pengambilan Data



Proses Wawancara



**EFEKTIVITAS PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS
KINERJA DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

**Oleh
MARINI INDRIANI
105730501114**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan sengaja pergi agar dicari, jangan sengaja lari agar dikejar, karena berjuang tak sepercanda itu”

“Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses.
Tuhan hanya menyuruh kita agar berjuang tanpa henti”

“Hidup ini seperti secangkir kopi, Dimana ada pahit dan manis melebur, bertemu dalam kehangatan”

“Kesuksesan itu nggak kayak indomi yang biasa dinikmati dengan proses instan, Karena kesuksesan adalah anak dari ketekunan dan kesabaran”

Persembahan

Sujud syukur ku persembahkan pada ALLAH yang maha kuasa, berkat dan rahamat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi ku pada orang tersayang:

Kedua orang tua ku Bapak dan Ibunda ku Tercinta yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini. Terima kasih buat Bapak dan Ibu.

..Marini Indriani..



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Makassar
Nama Mahasiswa : MARINI INDRIANI
NIM : 10573 05011 14
Jurusan : AKUNTANSI
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Desember 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. Edi Jusriadi, SE.,M.M.
NIDN: 0922027901

Pembimbing II

Muchriana Muchran, SE.,M.Si.,Ak.CA.
NIDN: 093009880

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ismail Rasulong, SE., MM.
NBM. 903 078

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE., M.Si. AK.CA. CSP.
NBM. 107 3428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Telp. (0411)860 132 Makassar 90221

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **MARINI INDRIANI**, NIM: **10573 05011 14**, telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 123/2018, tanggal 15 Rabiul Akhir 1440 H/22 Desember 2018 M, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Rabiul Akhir 1440 H
22 Desember 2018 M

Panitia Ujian

- [Signature]*
.....
1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM.
(Rektor Unismuh Makassar)
 2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
 3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR., S.E., M.M.
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
 4. Penguji : 1. Dr. Andi Rustam, S.E., M.M., Ak. CA., CPA.
2. Linda Arisanti Razak, S.E., M.Si. Ak. CA.
3. Mira, S.E., M.Ak. Ak.
4. Hasanuddin, S.E., M.Si.

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, S.E., M.M.
NBM: 903078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARINI INDRIANI
Stambuk : 10573 05011 14
Jurusan : Akuntansi
Dengan Judul : Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dalam
Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 15 Rabiul Akhir 1440 H
22 Desember 2018 M

Yang Membuat Pernyataan,



Marini Indriani

Diketahui Oleh :

~~Dekan Fakultas Ekonomi~~



~~Ismail Rasulong, S.E., M.M.
NBM : 903078~~

Ketua Program Studi Akuntansi

Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak CA.
NBM : 107 3428

ABSTRAK

MARINI INDRIANI, 2018. *Efektivitas penerepan anggaran berbasis kinerja dalam menilai kinerja keuangan pemerintah kota Makassar*, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Edi Jusriadi dan Pembimbing II Ibu Muchriana Muchran.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kota Makassar setelah pemberlakuan anggaran berbasis kinerja. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat analisis varians pendapatan daerah untuk mengetahui kinerja keuangan daerah pemerintah Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar periode 2014-2016.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Makassar tahun anggaran 2014-2016 pada tabel 4.3 dilihat dari Varians Pendapatan Daerah, secara umum dapat dikatakan cukup efektif. Dimana Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran penerimaan dengan target anggaran penerimaan, sehingga nilai efektivitas PAD 90%-99% dikategorikan cukup efektif. Sedangkan jika dilihat pada tabel 4.4 terlihat bahwa PEMKOT Makassar pada masa penerapan anggaran berbasis kinerja telah melakukan efisiensi belanja yang dibuktikan dengan Analisis Varians Belanja pada tiap tahun diatas 100% dengan kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif. Secara umum dilihat dari Analisis Varians Belanja Daerah, Kinerja Keuangan pemerintah daerah kota makassar dapat dikatakan sangat efektif. ini menunjukkan bahwa PEMKOT Makassar berhasil memanfaatkan anggaran belanjanya menjadi lebih efisien, karena kegiatan ekonomi pemerintah daerah telah berjalan lancar didukung dengan infrastruktur yang memadai, sehingga secara keseluruhan dari tahun 2014-2016 PEMKOT Makassar bisa dikatakan sangat efektif dalam mengelola anggaran keuangan daerah dengan menunjukkan adanya peningkatan tingkat efisiensi yang mengindikasikan telah dilakukan perbaikan kinerja oleh pemerintah.

Kata Kunci : Anggaran Berbasis Kinerja, Kinerja Keuangan

ABSTRACT

MARINI INDRIANI, 2018. *Effectiveness of performance-based budgeting in assessing the financial performance of Makassar*, city government, Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Advisor I, Mr. Edi Jusriadi and Advisor II, Mrs. Muchriana Muchran.

The purpose of this study was to determine the financial performance of the Makassar City government after the implementation of performance-based budgets. In this study, researchers used a regional income variance analysis tool to determine the regional financial performance of the Makassar City government. This research is a quantitative descriptive research that is research that seeks to describe the current problem solving using numbers, starting from data collection, interpretation of the data and the appearance of the results. The data collection technique used in this study uses documentation techniques. The data used is secondary data in the form of Realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget of Makassar City 2014-2016.

The results of the study show that the Financial Performance of Regional Revenues of the Makassar City Government in the 2014-2016 fiscal year in Table 4.3 is seen from the Regional Income Variance, in general it can be said to be quite effective. Where the effectiveness level is measured by comparing the realization of the revenue budget with the revenue budget target, so that the value of the effectiveness of PAD 90% -99% is categorized quite effective. Whereas if seen in Table 4.4, it can be seen that the Makassar City Government during the implementation of performance-based budgets has carried out expenditure efficiency as evidenced by the Shopping Variance Analysis above 100% each year with the criteria for the effectiveness of the budget if the comparison results are more than 100%. very effective. In general, seen from the Analysis of Regional Expenditure Variances, the Financial Performance of the Makassar City Regional Government can be said to be very effective. This shows that the PEMKOT Makassar has succeeded in utilizing its shopping budget to be more efficient, because the regional government economic activities have been running smoothly supported by adequate infrastructure, so that overall from 2014-2016 the PEMKOT Makassar can be said to be very effective in managing regional financial budgets by showing an increase efficiency level which indicates that performance improvements have been made by the government.

Keywords: Performance Based Budgeting, Financial Performance

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur atas izin dan petunjuk Allah SWT, sehingga skripsi dengan Judul : **“Efektivitas Penerepan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Makassar.”** dapat diselesaikan. Puji syukur kepada Allah SWT atas apa yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ini yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata dan dituliskan dengan kalimat apapun. Salam dan salawat atas junjungan Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa berada dalam panutan beliau untuk mencari kemaslahatan hingga akhir zaman.

Teristimewa, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku **Jarudin** dan **St. Hawa**, yang tiada batas memberi doa tulus dan dukungan yang tiada habisnya. Saudara dan keluarga atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Begitu pula ucapan terimakasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak., CA. CSP, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Edi Jusriadi, SE.,M.M., dan Ibu Muchriana Muchran, SE.,M.Si.,Ak.CA, selaku pembimbing I dan pembimbing II.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen di Jurusan Akuntansi yang telah memberikan banyak ilmu dan berbagi pengalaman di Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Para karyawan dan karyawan serta staff di BPKA kota Makassar yang telah membantu selama penulis meneliti.
7. Kepada kakak-kakak tercintaku Jikran dan Tiflan yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
8. Rekan seperjuangan Jurusan Akuntansi Angkatan 2014 terkhusus kelas AK 9 Universitas Muhammadiyah Makassar, terimakasih atas solidaritas yang diberikan selama menjalani perkuliahan, semoga keakraban dan kebersamaan kita untuk selamanya.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak sempat disebutkan satu persatu semoga menjadi ibadah dan mendapat imbalan dari-Nya.

Tiada gading yang tak retak, tak ada makhluk yang sempurna. Demikian pula dalam penulisan skripsi ini, masih terdapat kekurangan yang tentunya membutuhkan perbaikan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran, kritik yang Sifatnya membangun dari para pembaca.

Tiada imbalan yang dapat diberikan oleh penulis, hanya kepada Allah SWT penulis menyerahkan segalanya dan semoga bantuan yang diberikan selama ini bernilai ibadah disisi-Nya Amin...

Makassar, Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	viii
ABSTRAC.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Keuangan Daerah	6
B. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	9
C. Anggaran Berbasis Kinerja.....	19
D. Tinjauan Empiris	22
E. Kerangka Konsep.....	30
F. Hipotesis	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Definisi Operasional	31
D. Populasi dan Sampel	32

E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknis Analisis	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar.....	36
B. Hasil Penelitian.....	49
C. Pembahasan	54
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	26
3.2 Devinisi Operasional Variabel Dan Skala Pengukuran.....	32
4.3 Analisis Varians Pendapatan Daerah BPKA Kota Makassar	50
4.4 Analisis Varians Pendapatan Belanja BPKA Kota Makassar.....	52

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
2.1 Kerangka Konsep	30
4.1 Struktur Organisasi BPKA Kota Makassar	38

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi APBD Kota Makassar Tahun 2014
2. Laporan Realisasi APBD Kota Makassar Tahun 2015
3. Laporan Realisasi APBD Kota Makassar Tahun 2016
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
6. Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah sekarang ini dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki, agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomi daerah yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik (Abdul Halim:2007), (Rahmad Hidayat, 2015).

Kinerja memang telah menjadi sorotan penting dalam seluruh tahapan penyelenggaraan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Kinerja pemerintah saat ini sering dinilai tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas. Dalam hal evaluasi kinerja saja hingga saat ini belum tersedia payung hukum yang menjadi dasar dan pedoman penyusunan dokumen evaluasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu minimnya jumlah dan kualitas pengelolaan kebijakan pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab kurang berkualitasnya produk kebijakan yang dihasilkan. Sehingga peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai salah satu visi/misi dan tujuan pemerintah daerah akan sulit tercapai (Ira Halidayati, 2014).

Kinerja adalah Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.

(Mohamad Mahsun, 2013:25). Tidak hanya kinerja yang menjadi sorotan saat ini, tetapi juga anggaran publik selalu dikaitkan dengan akuntabilitas eksekutif organisasi. Konflik yang terjadi dalam penentuan anggaran sangat berpengaruh terhadap kapabilitas eksekutif organisasi untuk mengendalikan pengeluaran (Bastian, 2010:192).

Selain itu, sejalan dengan yang diamanatkan dalam undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang perimbangan keuangan Negara akan pula diterapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik agar penggunaan anggaran tersebut bisa dinilai kemanfaatan dan kegunaannya oleh masyarakat. Undang-undang No.17 tahun 2003 menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja Anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Adapun kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik (Mariana, 2005). Melalui permendagri No. 13 tahun 2006 implementasi pradigma baru yang berorientasi pada prestasi kinerja dapat diterapkan dalam penyusunan APBD, baik dalam system akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran berbasis kinerja adalah memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Hal ini akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses

pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah. (Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, 2012:43). Dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja maka setiap pemerintah daerah akan diketahui kinerjanya. Kinerja ini akan tercermin pada laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan prestasi kerja satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). (Sem Silahi, 2012)

Faktor lain yang turut menentukan suatu organisasi sukses dalam meningkatkan kinerja adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Menurut Mardiasmo dalam Almanda (2013) menerangkan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah akan tercapai dengan dilaksanakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, artinya sistem akuntansi keuangan daerah dapat menimbulkan dukungan yang kuat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah yang dicapai (Hidayat, 2015).

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Pasal 232 ayat (3) Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 dalam Abdul Halim, 2014:83)

Oleh karena itu, diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri (Bastian, 2006:6). Hal tersebut sesuai dengan

ciri penting dari suatu daerah otonomi yang mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya yaitu terletak pada strategi sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan daerah (Soedjono 2000).

Pemerintah Kota (PEMKOT) Makassar merupakan salah satu Pemerintahan Daerah di Sulawesi Selatan yang diharuskan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan tersebut berpedoman pada ketentuan pokok yang menyangkut pengelolaan keuangan dan otonomi daerah serta peraturan pelaksanaannya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam penerapannya diperkuat oleh peraturan daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penting dilakukan riset terkait **“Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah Kota Makassar “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah Anggaran berbasis kinerja Efektif digunakan untuk menilai kinerja Keuangan pemerintah daerah Kota Makassar ?”

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan, Adapun tujuan penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui Anggaran berbasis

kinerja Efektif digunakan untuk menilai kinerja Keuangan pemerintah daerah Kota Makassar ?”

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dilakukan dengan harapan bahwa penelitian ini dapat memberi manfaat bagi peneliti maupun orang lain. Hasil ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam berbagai hal, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam penentuan pengelolaan keuangan, serta referensi yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja dalam menilai kinerja keuangan pemerintah kota makassar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah Pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan akuntansi pemerintahan serta pengalaman dalam hal meneliti.

b. Bagi Pemerintah Kota Makassar

Sebagai informasi sebagai tambahan referensi dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah setelah diberlakukannya anggaran berbasis kinerja.

c. Bagi Penulis Selanjutnya

Berguna sebagai informasi dan masukan untuk penelitian yang akan datang yang membahas topik permasalahan yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keuangan Daerah

1. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan daerah yang berlaku. Dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 dinyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dari uraian tersebut dapat di ambil kata kunci dari keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi atau sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah.

2. Ruang Lingkup keuangan daerah

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

- a) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi serta melakukan pinjaman

- b) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
- c) Penerimaan daerah
- d) Pengeluaran daerah
- e) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah
- f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah atau kepentingan umum.

3. Azas umum pengelolaan keuangan daerah

Keuangan daerah dikelola dengan azas tertentu. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Berikut ini adalah uraian terhadap azas umum pengelolaan keuangan daerah tersebut :

a) Tertib

Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawakan.

b) Taat pada peraturan perundang-undangan

Keuangan daerah dikelola dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

c) Efektif

Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

d) Efisien

Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

e) Ekonomis

Pemerolehan masukan (*input*) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

f) Transparan

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

g) Bertanggungjawab

Perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

h) Keadilan

Keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

i) Kepatuhan

Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

j) Manfaat

Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

B. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

1. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan pencapaian semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang dapat dijadikan kekayaan daerah dalam periode tertentu. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi organisasi. Dalam organisasi sektor publik, setelah adanya operasional anggaran, langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. "Akuntabilitas yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance* bukan hanya sekedar kemampuan menunjukan bagaimana menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien" (Mardiasmo 2002:121).

Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi merupakan perbandingan *ouput/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. "Sedangkan efektif merupakan tingkat standar kinerja atau program dengan target yang telah ditetapkan yang merupakan perbandingan-perbandingan *outcome* dengan *output*" (Mardiasmo, 2002:4).

2. Kinerja Keuangan Berdasarkan LAKIP

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ada kewajiban setiap instansi pemerintah untuk menyusun dan melaporkan Pensekema Strategi tentang program-program utama yang akan dicapai selama satu sampai dengan lima tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi dan jajarannya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan fungsi instansi. LAKIP tersebut sama sekali tidak menyinggung mengenai peran laporan keuangan instansi yang seharusnya menjadi dasar penyusunan LAKIP, padahal seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah bermuara pada keuangan/pendanaan.

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari pusat, Pemerintah Daerah kabupaten/Kota. Adapun penanggungjawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Selain itu, penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip yang lazim, yaitu laporan harus disusun secara, objektif, dan transparan. Disamping itu, perlu diperhatikan prinsip-prinsip lain:

- 1) Prinsip pertanggungjawaban (adanya responsibility center), sehingga lingkungannya jelas. Hal-hal yang dikendalikan (controllable) oleh pihak yang melaporkan harus dapat dimengerti pembaca laporan.

- 2) Prinsip pengecualian, yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambil keputusan dan pertanggung jawaban instansi yang bersangkutan. Misalnya, hal-hal yang menonjol baik keberhasilan maupun kegagalan, perbedaan antara realisasi dengan target/standar/budget, penyimpangan dari skema karena alasan tertentu dan sebagainya.
- 3) Prinsip manfaat , yaitu manfaat laporan harus lebih besar dari pada biaya penyusunan.

Isi dari LAKIP adalah uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang menjadiperhatian utama instansi pemerintah. Selain itu perlu dimasukkan juga beberapa aspek pendukung meliputi uraian pertanggungjawaban mengenai:

- a. Aspek keuangan
 - b. Aspek sumber daya
 - c. Aspek sarana dan prasarana
- 4) Metode kerja, pengendalian manajemen, dan kebijaksanaan lain yang mendukung pelaksanaan tugas instansi. Agar LAKIP dapat lebih berguna sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka bentuk dan isinya diseragamkan tanpa mengabaikan keunikan masing-masing instansi pemerintah.

Penyeragaman ini paling tidak dapat mengurangi perbedaan cara penyajian yang cenderung menjauhkan pemenuhan persyaratan minimal akan informasi yang seharusnya dimuat dalam LAKIP. Penyeragaman juga dimaksudkan untuk pelaporan yang bersifat rutin,

sehingga perbandingan atau evaluasi dapat dilakkan secara memadai. LAKIP dapat dapat dimasukan pada kategori laporan rutin, Karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali. Dan juga agar pengungkapan akuntabilitas aspek-aspek pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tidak tumpang tindih dengan pengungkapan akuntabilitas kinerja, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Uraian pertanggungjawaban keuangan dititikberatkan pada perolehan dan penggunaan dana, baik dana yang berasal dari dana alokasi APBD (rutin maupun pembangunan) maupun dana yang berasal dari PNBPN (penerimaan Negara bukan pajak).
- b. Uraian pertanggungjawaban sumber daya manusia, dititikberatkan pada penggunaan dan pembinaan dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil atau manfaat, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- c. Uraian mengenai pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana dititik beratkan pada pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangannya.
- d. Uraian tentang metode kerja, pengendalian manajemen dan kebijaksanaan lainnya, difokuskan pada manfaat atau dampak dari suatu kebijaksanaan yang merupakan cerminan pertanggungjawaban kebijaksanaan (*policy accountability*).

3. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2010) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dalam tiga bagian yaitu:

1) Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dapat terlihat dari realisasi pendapatan dan anggaran. Apabila realisasi melebihi anggaran yang telah dibuat maka kinerja pemerintah daerah dinilai baik. Berdasarkan realisasi anggaran, dapat dilakukan Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dengan cara:

a. Analisis Varians Pendapatan Daerah

Analisis Varians Pendapatan Daerah dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis Kinerja Keuangan Pendapatan. Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dikatakan memiliki Kinerja Keuangan Pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Sebaliknya, apabila realisasi pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena seharusnya demikian. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan diantisipasi (*unfavourable variansce*). Berikut ini rumus untuk menghitung Analisis Varians Pendapatan Daerah:

$$\text{Analisis Varians} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Tahun } t}{\text{Anggaran Pendapatan Tahun } t} \times 100\%$$

b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif atautkah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (*trend*) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah. Pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi. Selain mempertimbangkan faktor inflasi, penetapan target pertumbuhan pendapatan juga harus mempertimbangkan asumsi anggaran yang lain, misalnya kurs rupiah, harga minyak, dan sebagainya. Berikut ini rumus untuk Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah:

Pertumbuhan Pendapatan Tahun t =

$$\frac{\text{Pend. Tahun } t - \text{Pend. Tahun } (t-1)}{\text{Pend. Tahun } (t-1)} \times 100\%$$

c. Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah

1. Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Berikut ini rumus untuk menghitung Derajat Desentralisasi:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah Pendapatan Transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Berikut ini rumus untuk menghitung Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah:

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah =

$$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio Efektifitas Pajak Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektifitas pajak dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka 100 persen, untuk dapat menghitung Rasio Efisiensi Pajak Daerah diperlukan data tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Kinerja Keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari sepuluh persen. Berikut ini rumus untuk menghitung Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah:

Rasio Efektifitas Pajak Daerah =

$$\frac{\text{Realisasi Pend. Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efektifitas Pajak Daerah =

$$\frac{\text{Biaya Pemerolehan Pajak Daerah} \times 100\%}{\text{Realisasi Pajak Daerah}}$$

4. Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung Pendapatan Daerah.

Berikut ini rumus untuk menghitung Derajat Kontribusi BUMD:

Derajat Kontribusi BUMD =

$$\frac{\text{Pendapatan Bagian Laba BUMD} \times 100\%}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

2) Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah

Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dilakukan untuk mengevaluasi apakah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kinerja Keuangan Belanja Daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dapat dilakukan dengan cara:

a. Analisis Varians Belanja Daerah

Analisis ini merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi dengan anggaran. Selisih dalam analisis ini dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu: selisih disukai dan selisih tidak disukai. Selisih disukai terjadi saat realisasi belanja lebih kecil dari anggaran, sedangkan selisih yang tidak disukai terjadi jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya. Selisih yang signifikan akan memiliki dua kemungkinan, pertama dapat diartikan jika telah terjadi efisiensi anggaran. Kedua dapat diartikan sebaliknya, ini

terjadi jika selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi kurang tepat.

$$\text{Analisis Varians} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t}{\text{Anggara Belanja Tahun } t} \times 100\%$$

b. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Belanja Daerah sendiri biasanya memiliki kecenderungan untuk naik, kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan inflasi dan perubahan nilai tukar rupiah.

Pertumbuhan Belanja Tahun t=

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t - \text{Realisasi Belanja Tahun } t-1}{\text{Realisasi Tahun } t} \times 100\%$$

c. Analisis Keserasian Belanja Daerah

Analisis Keserasian Belanja Daerah menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya ada belanja secara optimal. Hal ini terkait anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Supaya fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis Keserasian Belanja Daerah antara lain berupa:

1) Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Rasio ini memberi informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi adalah belanja yang manfaatnya dapat habis dikonsumsi dalam

satu tahun anggaran. Pada umumnya, pemerintah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung akan memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah dengan pendapatan rendah. Penyebabnya adalah pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi sehingga pemerintah daerah tersebut cenderung melakukan belanja yang bersifat jangka pendek.

Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

$$= \frac{\text{Realisasi Operasi Belanja}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

2) Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui proporsi Belanja Daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal dalam tahun anggaran bersangkutan. Sifat dari belanja ini adalah jangka menengah dan panjang, selain itu belanja modal tidak rutin. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan rendah biasanya akan memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi. Penyebab terjadinya adalah pemerintah daerah yang memiliki tingkat pendapatan rendah akan berorientasi untuk melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang.

Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja =

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Modal}}$$

d. Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Rasio ini berguna untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah di nilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}}$$

C. Anggaran Berbasis Kinerja

1. Pengertian Anggaran

Mardiasmo (2011:61) menjelaskan, bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Bastian (2010:164) mengemukakan, bahwa anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Anggaran merupakan alat untuk mencegah informasi asimetri dan perilaku disfungsional dari agen atau pemerintah daerah serta merupakan proses akuntabilitas publik. Akuntabilitas melalui anggaran meliputi penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran. Selain itu, anggaran merupakan elemen penting dalam system pengendalian manajemen karena anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi,

evaluasi kinerja dan motivasi. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah, menjadi relevan dan penting.

2. Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja (*Performance based budgeting*) pada dasarnya adalah sebuah system penganggaran yang berorientasi pada *output*. Halim (2012:177) menyatakan, bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja. Bastian (2010:171) mengemukakan, bahwa anggaran berbasis kinerja adalah system penganggaran yang berorientasi pada "*output*" organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi

Menurut Kepmendagri No.29 tahun 2002 pengertian anggaran berbasis kinerja adalah:

- a. Suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.
- b. Didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Anggaran dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan.
- c. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan *value for money* dan efektifitas anggaran.

d. Anggaran kinerja merupakan system yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur (*indicator*) kinerja sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran program.

Berdasarkan pengertian anggaran berbasis kinerja menurut Bastian, komponen-komponen visi, misi dan rencana strategi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian penyusunan anggaran berbasis kinerja membutuhkan suatu sistim administrasi publik yang telah ditata dengan baik, konsisten dan terstruktur sehingga kinerja anggaran dapat dicapai berdasarkan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan. Melalui pengukuran kinerja, manajemen dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu unit organisasi dalam pencapaian sasaran dan tujuan untuk selanjutnya memberikan penghargaan (*reward*) untuk keberhasilan atau hukuman (*punishment*) untuk kegagalan.

3. Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam buku 2 pedoman penerapan penganggaran berbasis Kinerja (2009: 20), langkah-langkah pokok penerapan anggaran berbasis kinerja adalah sebagaiberikut:

- a. Penyusunan Rencana Strategi
- b. Sinkronisasi
- c. Penyusunan Kerangka Acuan
- d. Perumusan/penetapan Indikator Kinerja
- e. Pengukuran kinerja
- f. Pelaporan kinerja

D. Tinjauan Empiris

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini diantaranya Komang Sri Endrayani, Made Pradana Adiputra, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) yang meneliti tentang “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Mandang Gabriel Anton Jantje J. Tinangon, Inggriani Elim (2016) telah melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja untuk Menunjang Akuntabilitas Publik pada Badan Lingkungan Hidup Kota Manado”. Penelitian tersebut menemukan bahwa Badan Lingkungan Hidup kota Manado telah melakukan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang bertujuan untuk menunjang akuntabilitas publik secara baik dan benar sesuai dengan UU No.17 tahun 2003.

Anita Wahyu Wijayanti, Mujibur Rahman Khairul Muluk, Ratih Nurpratiwi (2012) telah melakukan penelitian tentang “Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usulan program dan kegiatan melalui proses musrenbang berpotensi menciptakan rencana program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi usulan program dan kegiatan pembangunan dari masyarakat tidak bisa terakomodir semuanya dikarenakan masyarakat kurang mendapatkan

informasi program pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah daerah tahun bersangkutan.

Taufik Kurrohman (2013) melakukan penelitian tentang "Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja melalui Kinerja Keuangan yang Berbasis Value For Money di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur". Dalam penelitian ini penulis ingin menguji kinerja keuangan pemerintah daerah setelah menggunakan anggaran berbasis kinerja dengan pendekatan value for money. Dengan melakukan uji beda sebelum menggunakan anggaran berbasis kinerja dengan sesudah menggunakan anggaran berbasis kinerja. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah daerah lebih ekonomis dan efisiensi dalam pengelolaan keuangannya setelah menggunakan anggaran berbasis kinerja.

Rolly Yandra & Endang Sutrisna (2013) telah melakukan penelitian tentang "Penyusunan APBD Berbasis Kinerja". Untuk menguji hipotesis pengaruh komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan yang jelas dan hukuman/sanksi yang tegas berpengaruh terhadap APBD berbasis kinerja secara simultan dan parsial digunakan uji F dan uji t. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan yang jelas dan hukuman/ sanksi yang tegas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap APBD berbasis kinerja.

Muh. Irfan, Budi Santoso, Lukman Effendi (2016) telah melakukan tentang "Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Asimetri Informasi, Penekanan Anggaran dan Komitmen

Organisasional sebagai Variabel Pemoderasi”. Metode analisis menggunakan SEM berbasis varian SmartPLS Versi 2.0 M3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap anggaran kendur. Penelitian ini dapat membuktikan adanya interaksi dengan anggaran asimetri informasi partisipasi, penekanan anggaran memiliki efek negatif yang signifikan, sedangkan organisasi Komitmen secara signifikan mempengaruhi kelonggaran anggaran.

Seto Wibisono, Ikhsan Budi Riharjo (2016) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner yang dibagikan kepada para responden. Analisa data menggunakan model analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel yakni perencanaan anggaran, implementasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Febrina Astria Verasvera (2016) telah melakukan penelitian tentang “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptifmetode dengan pendekatan studi kasus, dan pengujian hipotesis menggunakan Rank Spearman Analisis korelasi untuk mengetahui variabel korelasi X (Budgeting based Kinerja) dan Variabel Y (Kinerja Aparatur Daerah). Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y, menggunakan koefisien determinasi. Hal ini ditunjukkan pada hasil korelasi Rank Spearman $r_s = 0,6956$ dan interval dari 0,60-0,79 yang menunjukkan tingkat asosiasi yang kuat juga Sebagai hasil pengujian

hipotesis maka hasilnya menunjukkan bahwa $t_{hitung} 7.1150 > t_{tabel} 1.6707$. Hal itu membuat indikasi penolakan terhadap H_0 yang menandakan hal itu ada adalah hubungan positif antara variabel X dengan variabel Y dan untuk koefisien determinasi yang menunjukkan banyak pengaruh penganggaran berdasarkan kinerja terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah yang diperoleh Hasilnya adalah 48,39% sedangkan 51,61% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Sehingga diharapkan semua itu pejabat di Dinas Sosial mampu melaksanakan penganggaran berdasarkan kinerja lebih baik.

Hasri Raka Sahri (2016) telah melakukan penelitian tentang “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru”. Sampelnya digunakan sebagai Responden diambil dengan menggunakan metode sampling proposif. Sebagian Hasil penelitian menemukan bahwa variabel kinerja berbasis anggaran dan Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Wiwik Andriani Ermataty Hatta (2012) telah melakukan penelitian tentang “Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Pusat (Studi pada Politeknik Negeri)” Hasil penelitian ini membuktikan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi, penganggaran belum didasarkan pada prioritas, kekurangannya dana dan tidak tersedianya indikator kinerja yang jelas untuk setiap aktivitas.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis/ Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Komang Sri Endrayani, Made Pradana Adiputra, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014)	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Akuntabilitaskinerja, Anggaran berbasis kinerja, Dinas Kehutanan	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2	Mandang Gabriel Anton Jantje J. Tinangon, Inggriani Elim (2016)	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Penerapan Anggaran Berbasis kinerja, Perencanaan Anggaran, Implementasi Anggaran, Pertanggungjawaban anggaran, Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel yakni perencanaan anggaran, implementasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3	Anita Wahyu Wijayanti, Mujibur Rahman Khairul Muluk, Ratih Nurpratiwi (2012)	Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan	Anggaran berbasis kinerja, Musrenbang, Perencanaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa usulan program dan kegiatan melalui proses musrenbang berpotensi menciptakan rencana program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4	Rolly Yandra & Endang Sutrisna (2013)	Penyusunan APBD Berbasis Kinerja	Komitmen Organisasi, Sistem Administrasi, APBD berbasis kinerja	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang

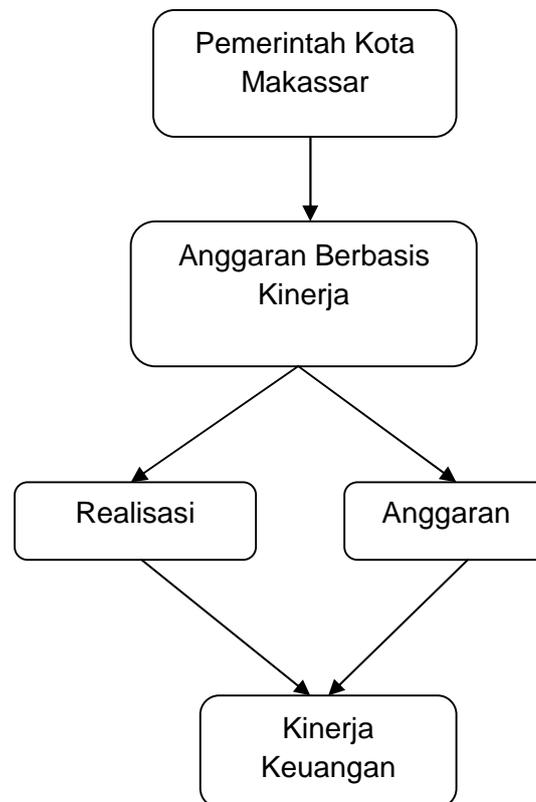
				cukup, penghargaan yang jelas dan hukuman/ sanksi yang tegas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap APBD berbasis kinerja.
5	Taufik Kurrohman (2013)	Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja melalui Kinerja Keuangan yang Berbasis Value For Money di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur	Penganggaran Berbasis Kinerja, Nilai Uang, Kinerja Keuangan	. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah daerah lebih ekonomis dan efisiensi dalam pengelolaan keuangannya setelah menggunakan anggaran berbasis kinerja.
6	Seto Wibisono, Ikhsan BudiRiharjo (2016)	Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja untuk Menunjang Akuntabilitas Publik pada Badan Lingkungan Hidup Kota Manado	Anggaran, Anggaran berbasis kinerja, Akuntabilitas public.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Lingkungan Hidup kota Manado telah melakukan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang bertujuan untuk menunjang akuntabilitas publik secara baik dan benar sesuai dengan UU No.17 tahun 2003.
7	Muh. Irfan, Budi Santoso, Lukman Effendi (2016)	Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Asimetri Informasi, Penekanan Anggaran dan Komitmen Organisasional	Partisipasi Anggaran; Asimetri Informasi; Penekanan Anggaran; Komitmen berorganisasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap anggaran kendur. Penelitian ini dapat membuktikan adanya interaksi dengan anggaran asimetri informasi partisipasi, penekanan anggaran memiliki

		I sebagai Variabel Pemoderasi		efek negatif yang signifikan, sedangkan organisasi Komitmen secara signifikan mempengaruhi kelonggaran anggaran
8	Febrina Astria Verasvera (2016)	Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	Anggaran Kinerja	Hal ini ditunjukkan pada hasil korelasi Rank Spearman $r_s = 0,6956$ dan interval dari $0,60-0,79$ yang menunjukkan tingkat asosiasi yang kuat juga Sebagai hasil pengujian hipotesis maka hasilnya menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 7.1150 > t_{tabel} 1.6707$. Hal itu membuat indikasi penolakan terhadap H_0 yang menandakan hal itu ada adalah hubungan positif antara variabel X dengan variabel Y dan untuk koefisien determinasi yang menunjukkan banyak pengaruh penganggaran berdasarkan kinerja terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah yang diperoleh Hasilnya adalah $48,39\%$ sedangkan $51,61\%$ dipengaruhi oleh faktor lainnya. Sehingga diharapkan semua itu pejabat di Dinas Sosial mampu melaksanakan penganggaran

				berdasarkan kinerja lebih baik.
9	Hasri Raka Sahri (2016)	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru	Penganggaran, Pengendalian, Kinerja Keuangan	Sebagian Hasil penelitian menemukan bahwa variabel kinerja berbasis anggaran dan Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
10	Wiwik Andriani Ermataty Hatta (2012)	Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Pusat (Studi pada Politeknik Negeri.	Pelaksanaan penganggaran, PNP, UU dari 17 thn 2003	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi, penganggaran belum didasarkan pada prioritas, kekurangannya dana dan tidak tersedianya indikator kinerja yang jelas untuk setiap aktivitas.

E. Kerangka Konsep

Adapun faktor yang berhubungan dengan anggaran berbasis kinerja adalah realisasi, anggaran dan kinerja keuangan. Namun tidak semua variabel diteliti dalam penelitian ini, dengan pertimbangan kepentingan peneliti dilapangan, Keterbatasan kemampuan dan waktu peneliti. Peneliti hanya meneliti beberapa variabel saja yaitu laporan keuangan dan anggaran berbasis kinerja, maka kerangka konsep sertavariabel dalam penelitian ini secara sistematis dapat digunakan sebagai berikut :



Bagan 2.1

Kerangka Pemikiran

F. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini menyatakan bahwa di duga efektivitas anggaran berbasis kinerja dalam menilai kinerja Keuangan pemerintah daerah Kota Makassar sudah tercapai dengan melihat dari sisi lapoaran realisasi pendapatan maka dapat dikategorikan cukup efektif dengan nilai dibawah 100% sebesar 92,87% sedangkan jika dilihat dari sisi realisasi belanja daerah maka dapat dikategorikan sangat efektif dengan nilai lebih dari 100% sebesar 115,56%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, dan sistem pemikiran. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki. (Nazir, 2009:23).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar yang terletak di Jl. Jend. Ahmad Yani No.2, Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90171. Penelitian ini direncanakan selama kurang lebih dua bulan, yaitu dari bulan April-Mei tahun 2018.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan karakteristik dari objek dalam elemen-elemen yang dapat diobservasi yang menyebabkan konsep dapat diukur dan dioperasionalkan dalam penelitian (Erlina, 2008:11). Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pelaksanaan penelitian ini, maka perlu diberikan definisi variabel operasional yang akan diteliti. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Anggaran Berbasis Kinerja sementara variabel dependen dari penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Makassar.

Tabel 3.2
Definisi Operasional variabel dan skala pengukuran

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Anggaran Berbasis Kinerja (X)	Sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kinerja atau keluaran (output) dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan. Dengan demikian diharapkan penyusunan dan pengalokasian anggaran dapat lebih disesuaikan dengan skala prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan	Realisasi Anggaran dan Belanja daerah
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang dituangkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang baik secara langsung maupaun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.	Petumbuhan Kinerja Keuangan

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu data laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar.

Sampel yang di ambil dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan berupa neraca seperti laporan realisasi anggaran (LRA) dan perubahan saldo anggaran lebih, dan laporan finansial pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar dari tahun 2013 sampai 2017.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, Bentuk metode ini merupakan pengamatan secara langsung pada keadaan yang sebenarnya di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar.

2. Teknik wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung secara lisan dengan beberapa pihak yang berkompeten dan berwenang dalam memberikan data yang dibutuhkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar.
3. Teknik dokumentasi dalam hal ini penulis mengumpulkan data sekunder melalui pengambilan data yang ada di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar. serta dengan cara mencari data yang telah ada di beberapa website yang mengandung materi bahan mengenai laporan ataupun kondisi keuangan Pemerintah Kota Makassar.

F. Teknik Analisis

1. Analisis Varians Pendapatan Daerah

Pemerintah daerah dikatakan memiliki Kinerja Keuangan Pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Sebaliknya, apabila realisasi pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Maka rumus yang digunakan untuk menghitung Analisis Varians Pendapatan Daerah adalah :

$$\text{Analisis Varians} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Tahun } t}{\text{Anggaran Pendapatan Tahun } t} \times 100\%$$

2. Analisis Varians Belanja Daerah

Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dilakukan untuk mengevaluasi apakah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kinerja Keuangan Belanja Daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dapat dilakukan dengan cara:

$$\text{Analisis Varians} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t}{\text{Anggara Belanja Tahun } t} \times 100\%$$

Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Kinerja pemerintah dikatakan efektif apabila rasio antara 90,01% s/d 100%, semakin tinggi rasio efektivitas berarti kinerja akan semakin baik dan semakin rendah rasio efektivitas berarti semakin buruk (Yunianti, 2015). Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran penerimaan dengan target anggaran penerimaan. Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Sangat efektif : >100%
- b. Efektif : 100%
- c. Cukup efektif : 90%-99%
- d. Kurang efektif : 75%-89%
- e. Tidak efektif : <75%

Menurut Mahsun dalam Sumenge (2013) tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja, Kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja sebagai berikut:

- a. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif
- b. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif

- c. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif
- d. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif
- e. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar

Kota Makassar kadang dieja *Macassar*, *Mangkasar*, dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai ujung pandang, adalah kota terbesar dikawasan Indonesia Timur dan sekaligus ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota ini terletak di pesisir barat daya pulau Sulawesi, berhadapan dengan Selat Makassar.

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km².

Berdasarkan pearturan daerah nomor 7 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2009 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah kota Makassar. Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset (BPKA) kota Makassar merupakan salah satu unsur staf yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota.

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) :

“Mewujudkan APBD yang berkualitas menuju opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 2019”.

Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) :

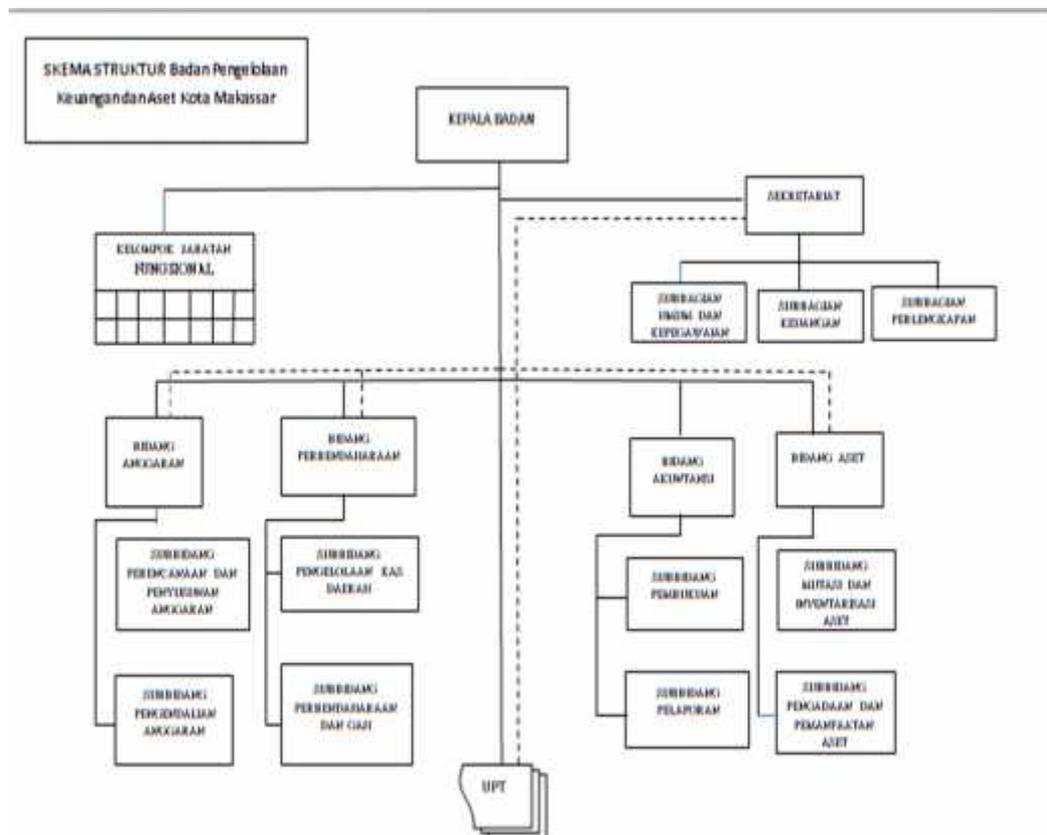
1. Menciptakan kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan dan tepat waktu.
2. Meningkatkan Akurasi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
3. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah menuju opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
4. Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah yang profesional dan modern.
5. Meningkatkan sarana, prasarana dan SDM dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah kota Makassar dan Peraturan Walikota Makassar No 12 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Organisasi Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar terdiri dari: 1 (Satu) Kepala Badan, 1 (satu) sekretaris, 4 (empat) kepala bidang, 3 (tiga) kepala sub bagian, dan 8 (delapan) kepala sub bidang. Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar, disajikan pada Bagan 1 sebagai berikut:

Bagan 1
Struktur Organisasi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar



Badan Pengelolaan Keuangan dan aset dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan Mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Keuangan Daerah, berdasarkan pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, dan
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2).
9. Peraturan Walikota Makassar No 12 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Secara lengkap, struktur organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Sekretaris

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan
- c. Kepala Sub Bagian Perlengkapan

3. Kepala Bidang Anggaran

- a. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
- b. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran

4. Kepala Bidang Perbendaharaan

- a. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
- b. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Gaji

5. Kepala Bidang Akuntansi

- a. Kepala Sub Bidang Pembukuan
- b. Kepala Sub Bidang Pelaporan

6. Kepala Bidang dan Aset

- a. Kepala Sub Bidang Mutasi dan Inventarisasi Aset
- b. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Aset.

Adapun tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar yang dipimpin oleh Kepala Badan dan dibantu jajaran struktural, sebagai berikut :

a. Sekretasis

Secara umum tugas pokok Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di

lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengelolaan ketatausahaan Badan
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian Badan
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan Badan
- 4) pelaksanaan urusan perlengkapan Badan
- 5) Pelaksanaan urusan umum dan rumahtangga Badan
- 6) Pelaksanaan koordinasi perumusan program kerja dan rapat kerja Badan.

b. Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam urusan penyusunan anggaran, administrasi anggaran dan pembiayaan dan investasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Anggaran menyelenggarakan Fungsi:

- 1) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Anggaran
- 2) Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Anggaran
- 3) Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 4) Pelaksanaan kebijakan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah.
- 5) Penyusunan KUA dan PPAS beserta perubahannya.

- 6) Pengkoordinasian penyusunan standar harga dan analisis standar belanja daerah.
- 7) Melaksanakan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD.
- 8) Penyusunan perencanaan anggaran kas dan menetapkan SPD.
- 9) Pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan daerah dan kebijakan pengelolaan anggaran.
- 10) Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dan pelaksanaan pembiayaan dan investasi daerah.
- 11) Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan pembiayaan dan investasi.
- 12) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 13) Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

c. Kepala Bidang Perbendaharaan

Kepala bidang perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam pengelolaan perbendaharaan umum daerah, perbendaharaan belanjadan verifikasi bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Perbendaharaan.
- 2) Perumusan bahan/ data dan informasi untuk menyusun program pembangunan di bidang perbendaharaan.

- 3) Pelaksanaan penerbitan SP2D.
- 4) Pelaksanaan pemantauan penerimandan pengeluaran APBD oleh Bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.
- 5) Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
- 6) Pelaksanaan penyimpangan uang daerah dan penempatan uang daerah.
- 7) Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
- 8) Pengkoordinasian pelaksanaan kewajiban perpajakan.
- 9) Penyusunan kebijakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan umum daerah, belanja dan verifikasi kelengkapan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah.
- 10) Pelaksanaan penyusunan peraturan pelaksanaan dan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 11) Pelaksanaan verifikasi dan meneliti kelengkapan administrasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 12) Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

d. Kepala Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi memiliki tugas pokok menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang piutang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya dalam rangka

menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Akuntansi.
- 2) Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan akuntansi daerah.
- 3) Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
- 4) Pelaksanaan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
- 5) Pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
- 6) Melaksanakan pengelolaan hutang dan piutang daerah.
- 7) Penyelenggaraan evaluasi laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 8) Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

e. Kepala Bidang Aset

Kepala bidang aset memiliki tugas pokok yaitu mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi mutasi aset dan inventarisasi serta pemanfaatan dan pemberdayaan aset.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Aset menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Aset.
- 2) Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang.
- 3) Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya.
- 4) Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi mutasi aset dan inventarisasi serta pemanfaatan dan pemberdayaan aset.
- 5) Pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan bahan kebijakan umum dan teknis rencana kebutuhan aset daerah, penelitian dan pengkajian kebutuhan barang daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang, mengikuti pelaksanaan pelelangan barang dan bangunan, pelaksanaan administrasi barang daerah, penilaian dan penyusutan aset daerah, pencatatan barang milik daerah, inventarisasi data aset daerah, penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah serta pelaksanaan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali.
- 6) Pelaksanaan penyusunan pedoman petunjuk teknis pemanfaatan dan pengendalian kekayaan daerah, evaluasi daftar hasil pengadaan barang daerah, pemantauan dan pengawasan kepemilikan aset daerah serta dokumentasi kepemilikan aset berupa kendaraan, tanah, dan bangunan.
- 7) Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait.

- 8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya
- 9) Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

2. Sumber Daya BPKA

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset. Data pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar berjumlah orang posisi tanggal 7 April 2014 dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 1. Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Total Orang
1	Golongan I	1	-	1
2	Golongan II	4	6	10
3	Golongan III	13	13	26
4	Golongan IV	3	1	4
Total		21	20	41

Tabel 2. Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total Orang
1	SD. SLTP	-	-	-
2	SLTA	2	2	4
3	Sarjana Muda/ D III	1	-	1
4	Sarjana (S1)	11	12	23
5	Master (S2)	7	6	13
6	Doktor (S3)	-	-	-
Total		21	20	41

Sumber : Sub Bagian Umum & Kepagawaian BPKA

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai instansi pemerintah kota Makassar menempati gedung kantor di Balaikota. Gedung kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset terletak di jalan

Jenderal Ahmad Yani 2 Makassar yang ditempati oleh Kepala Badan selaku Bendahara Umum Daerah, Sekretaris, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, Bidang Aset.

3. Kinerja Pelayanan BPKA

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja pengelolaan keuangan dan aset kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar masih terbilang SKPD yang baru itu kinerja pelayanan yang akan kami capai yang terdiri :

1. Penyusunan APBD yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Akurasi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
3. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang sistematis, akuntabel dan terstruktur.
4. Pengelolaan barang milik daerah yang profesional dan modern.
5. Meningkatkan kapasitas organisasi pengelolaan keuangan dalam hal ini SDM, sarana dan prasarana aparatur BPKA.

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKA

Yang menjadi tantangan pelayanan Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Kota Makassar adalah:

1. Sinergitas APBD dengan dokumen perencanaan secara terpadu dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Meningkatkan akurasi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
3. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang meraih opini BPK wajar tanpa pengecualian (WTP).
4. Pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Makassar yang tertib atau sesuai dengan SOP pengelolaan aset daerah.
5. SDM, sarana dan prasarana yang memadai bagi aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar.

Peluang pengembangan pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar yaitu :

1. Penyelenggaraan penyusunan APBD yang sesuai dengan dokumen perencanaan.
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh BPKA selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) sudah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) yang ada dan telah diverifikasi serta diteliti oleh PPK SKPD.
3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sesuai dengan PP 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
4. Melakukan koordinasi dalam peningkatan pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah.

5. Menciptkan aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang handal didukung oleh fasilitas dengan segala penunjangnya.

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2014-2016

Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah pada Kota Makassar secara umum menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dikatakan baik, tetapi masih kurang dalam penyelenggaraan desentralisasi dan terdapat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, serta dalam pemungutan pajak daerah belum efisien.

a. Analisis Varians Pendapatan Daerah

Analisis Varians Pendapatan Daerah dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan untuk membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis Kinerja Keuangan Pendapatan. Jika terdapat selisih lebih (realisasi pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan) maka dikatakan memiliki Kinerja Keuangan Pendapatan yang baik, sedangkan jika terdapat selisih kurang (realisasi pendapatan kurang dari jumlah yang dianggarkan) maka Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dinilai kurang baik (Mahmudi, 2010). Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena seharusnya demikian. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (*favourable variansce*), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak

diharapkan (*unfavourable variansce*). Berikut adalah tabel perhitungan Varians Pendapatan Daerah:

Tabel 4.3
Analisis Varians Realisasi Pendapatan

Tahun	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Selisih (Rp)	Presentase Realisasi Anggaran	Ket
2014	2.732.727.890.000	2.629.817.615.252	(102.910.274.748)	96,23%	Cukup Efektif
2015	3.221.742.911.000	2.952.609.910.737	(269.133.000.263)	91,65%	Cukup Efektif
2016	3.875.920.136.000	3.546.650.155.445	(329.269.980.555)	91,50%	Cukup Efektif
Total	9.830.390.937.000	9.129.077.681.434	(701.313.255.566)	92,87%	Cukup Efektif

Sumber : Data Olahan 2018

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, terlihat bahwa PEMKOT Makassar pada tahun 2014 memiliki tingkat presentase Realisasi Anggaran sebesar 96,23% dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan sebesar Rp 2.732.727.890.000 lebih besar dari yang terealisasi sebesar Rp 2.629.817.615.252 sehingga dapat dikategorikan cukup efektif. kemudian pada tahun 2015 PEMKOT Makassar mengalami penurunan sebesar 91,65%, dengan PAD yang dianggarkan sebesar Rp 3.221.742.911.000 dan Realisasi PAD sebesar Rp 2.952.609.910.737 dan termasuk dalam kategori cukup efektif, kemudian kembali menurun sebesar 91,50% pada tahun 2016 dengan Anggaran PAD sebesar Rp 3.875.920.136.000 dan Ralisasi PAD yaitu Rp 3.546.650.155.445 sehingga termasuk dalam kategori cukup efektif dengan hasil presentase rata-rata sebesar Rp 92,87% yang cukup efektif juga. nilai persentase efektivitas pengelolaan keuangan daerah di PEMKOT Makassar selama 3 tahun periode anggaran cukup efektif, yaitu dengan hasil persentase keseluruhan nilai efektivitas yang menunjukkan nilai dibawah 100%. Maka

semakin besar nilai efisiensi yang mendekati angka 100% atau lebih dari 100% menunjukkan tingkat efisiensi yang kurang baik dengan indikasi adanya kecenderungan pemborosan anggaran.

Sesuai dengan realisasi PAD PEMKOT Makassar juga semakin menurun, hal ini menjelaskan bahwa pengeluaran daerah pada tahun 2014 yang sempat mengakibatkan kurangnya efisiensi dalam pemanfaatan anggaran belanja daerah, namun memiliki efek jangka panjang yang tidak positif yaitu PEMKOT Makassar tidak berhasil meningkatkan realisasi PAD, yang mengindikasikan bahwa PEMKOT Makassar belum dikatakan mandiri, dalam arti tidak mampu mengelola daerahnya untuk meningkatkan sumber PADnya yang secara tidak langsung kegiatan perekonomian daerah tersebut juga tidak akan meningkat. Secara keseluruhan terbukti bahwa PEMKOT Makassar cukup efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

b. Analisis Varians Belanja Daerah

Analisis varians belanja daerah merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dan anggaran. Kinerja Keuangan pemerintah daerah dikatakan baik dan efisien jika terdapat selisih kurang (realisasi belanja kurang dari jumlah yang dianggarkan), sedangkan dikatakan tidak baik jika terdapat selisih lebih (realisasi belanja lebih dari jumlah yang dianggarkan). Rasio ini berguna untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah di nilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran. Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam

periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Berikut tabel Analisis Varians Belanja Daerah Kota makassar tahun 2014-2016 :

Tabel 4.4
Analisis Varians Belanja Daerah

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Selisih (Rp)	Presentase Realisasi Anggaran	Ket
2014	2.957.754.417.000	2.606.083.333.328	(351.671.083.671)	113,49%	Sangat Efektif
2015	3.475.894.752.000	3.062.274.393.637	413.620.358.363	113,50%	Sangat Efektif
2016	3.905.887.927.000	3.278.340.966.082	627.546.960.918	119,14%	Sangat Efektif
Total	10.339.537.096.000	8.946.698.047.000	1.3928.38.402.953	115,56%	Sangat Efektif

Sumber : Data Olahan 2018

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, terlihat bahwa PEMKOT Makassar pada masa penerapan anggaran berbasis kinerja telah melakukan efisiensi belanja yang dibuktikan dengan Analisis Varians Belanja pada tiap tahun diatas 100% dan dengan rata-rata keseluruhan adalah sebesar 115,56%. Ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan PEMKOT Makassar pada masa pemberlakuan anggaran berbasis kinerja sangat efektif. Pada tahun 2014 presentase realisasi anggaran sebesar 113,49% sehingga dapat dikategorikan sangat efektif dengan jumlah anggaran belanja Rp 2.957.754.417.000 lebih besar dari realisasi yaitu sebesar Rp 2.606.083.333.328 kemudian pada tahun 2015 PEMKOT Makassar mengalami peningkatan presentase yaitu sebesar 113,50% sehingga termasuk dalam kategori sangat efektif dengan jumlah anggaran belanja Rp 3.475.894.752.000 lebih besar dari realisasi sebesar Rp 3.062.274.393.637, Kemudian kembali meningkat lagi 119,14% dari tahun 2016 sehingga termasuk dalam kategori sangata efektif juga dengan anggaran belanjaja yaitu Rp 3.905.887.927.000 lebih besar dari realisasi sebesar Rp 3.278.340.966.082.

Secara umum dilihat dari Analisis Varians Belanja Daerah, Kinerja Keuangan PEMKOT makassar dapat dikatakan sangat efektif, ini menunjukkan bahwa PEMKOT Makassar berhasil memanfaatkan anggaran belanjanya menjadi lebih efisien, karena kegiatan ekonomi pemerintah daerah telah berjalan lancar didukung dengan infrastruktur yang memadai, sehingga secara keseluruhan dari tahun 2014-2016 PEMKOT Makassar bisa dikatakan sangat efektif dalam mengelola anggaran keuangan daerah dengan menunjukkan adanya peningkatan tingkat efisiensi yang mengindikasikan telah dilakukan perbaikan kinerja oleh pemerintah. Namun dalam hal ini jika dilihat dari angka rata-rata persentase Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mencapai 115,68%. Presentase Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu 119,14%, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 113,49%, dari keseluruhan hasil presentase dapat dikategorikan sangat efektif, tetapi ketika lebih dari 100% maka akan mengindikasikan terjadinya pemborosan dalam penganggaran.

Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Analisis Varians menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan APBD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi penerimaan APBD maka dapat dikatakan efektif dan begitu pula sebaliknya.

C. Pembahasan

Penganggaran dengan pendekatan kinerja berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi adalah sejauh mana perbandingan antara tingkat keluaran suatu kegiatan (*output*) diminimalkan dengan masukan yang digunakan (*input*) dimaksimalkan. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif. Tolak ukur keberhasilan sistem anggaran ini terletak pada prestasi dari tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan.

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Makassar merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/Pemerintah kota Makassar, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran pemerintah kota Makassar secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah

disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
3. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Makassar tahun Anggaran 2014-2016 pada tabel 4.3 dilihat dari Varians Pendapatan Daerah, secara umum dapat dikatakan cukup efektif. Dimana Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran penerimaan dengan target anggaran penerimaan, sehingga nilai efektivitas PAD 90%-99% dikategorikan cukup efektif. Sedangkan jika dilihat pada tabel 4.4 terlihat bahwa PEMKOT Makassar pada masa penerapan anggaran berbasis kinerja telah melakukan efisiensi belanja yang dibuktikan dengan Analisis Varians Belanja pada tiap tahun diatas 100% dengan kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif. Secara umum dilihat dari Analisis Varians Belanja Daerah, Kinerja Keuangan pemerintah daerah kota makassar dapat dikatakan sangat efektif. ini menunjukkan bahwa PEMKOT Makassar berhasil memanfaatkan anggaran belanjanya menjadi lebih efisien, karena kegiatan ekonomi pemerintah daerah telah berjalan lancar didukung dengan infrastruktur yang memadai, sehingga secara keseluruhan dari tahun 2014-2016 PEMKOT Makassar bisa dikatakan sangat efektif dalam mengelola anggaran keuangan daerah dengan menunjukkan adanya peningkatan tingkat efisiensi yang mengindikasikan telah dilakukan perbaikan kinerja oleh pemerintah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa tingkat efektivitas anggaran berbasis kinerja dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah kota makassar efektif dilakukan dan mengalami peningkatan yang signifikan dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dari tahun 2014-2016. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika penerapan anggaran

berbasis kinerja dilakukan dengan baik, maka semakin besar pula tingkat efektivitas kinerja instansi pemerintah. Serta mengindikasikan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota makassar.

Pengelolaan keuangan daerah kota Makassar yang baik tentu harus sejalan dengan visi dan misi pemerintah kota Makassar, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah daerah, serta didasarkan atas *performance based budgeting*. Pengelolaan keuangan daerah yang baik ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki komitmen dan integritas untuk menjadi lebih baik. Dalam hal ini, yang paling pokok dari pertanggungjawaban keuangan adalah sebagai upaya konkrit dan niat baik pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan dalam mengalokasikan anggaran daerah agar efektif, efisien dan bertanggungjawab sehingga hasilnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Dari hasil wawancara tingkat kesesuaian dana yang diberikan dengan realisasi kegiatan pemerintah Kota Makassar berada pada angka rata-rata 90%. Dalam hal ini pemerintah Kota Makassar telah membuat output dan outcam serta hasil yang dicapai. Jumlah hasil dari proses atau kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sangat kecil kemungkinan ada ketidaksesuaian hasil yang direncanakan, jika ada ketidaksesuaian kemungkinan ada beberapa hal yang sifatnya nasional misalnya kebijakan dari pusat atau ada hal-hal lain dan kendala-kendala yang sangat teknis sehingga terjadi ketidaksesuaian pada saat pelaksanaan. Namun peluangnya

sangat kecil dibandingkan seluruh jumlah program kegiatan yang ada di pemerintah Kota Makassar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas anggaran berbasis kinerja dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah kota Makassar dapat dilihat dengan cara menilai kinerja pemerintah melalui laporan realisasi dan anggaran dari tahun 2014-2016, Jika dilihat dari sisi laporan realisasi pendapatan maka dapat dikategorikan cukup efektif dengan nilai dibawah 100% sebesar 92,87% sedangkan jika dilihat dari sisi realisasi belanja daerah maka dapat dikategorikan sangat efektif dengan nilai lebih dari 100% sebesar 115,56%.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti coba berikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Makassar
 - a. Agar lebih memaksimalkan pendapatan asli daerah dengan cara menambah dan menelusuri potensi daerah yang dapat menghasilkan penerimaan baik berupa pajak daerah maupun retribusi daerah.
 - b. Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi objektif berdasarkan peraturan yang berlaku serta melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan PAD.

- c. Pemerintah Kota Makassar harus terus berupaya memaksimalkan alokasi pendapatan terhadap belanja pembangunan, karena belanja pembangunan inilah yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian mengenai Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja masih belum banyak dilakukan sehingga masih memerlukan penelitian lanjutan. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menambah tahun penelitian sehingga dapat diketahui lebih jelas dampak dari penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Wahyu Wijayanti, Mujibur Rahman Khairul Muluk & Ratih Nurpratiwi. 2012. Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan. Vol. 15, No.3, (<http://www.wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/viewFile/237/210>, diakses 22 Januari 2018).
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta
- Febrina Astria Verasvera. 2016. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen*, (Online), Vol.15, No.2, (<http://journal.maranatha.edu/index.php/jmm/article/view/13/13/> , diakses 22 Januari 2018).
- Governance (Sinergi Masyarakat, Swasta, dan Pemerintah yang Berkeadilan), Vol. 2. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Hasri Raka Sahri Pembimbing: Restu Agusti dan Alazhar A. 2016. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. *JOM FEKON*, (Online), Vol. 3 No.1, (<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/viewFile/10213/9872>, diakses 22 Januari 2018).
- Indra Bastian. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi 4. Erlangga. Jakarta.
- Ira Halidayati. 2014. Pengaruh Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal.
- Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Made Pradana Adiputra, Nyoman Ari Surya Darmawan. 2014. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, (Online), Volume 2 No. 1, (<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/3390>, diakses 13 februari 2017).
- Mandang Gabriel Anton 1 Jantje J. Tinangon2 Inggriani Elim. 2016. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Untuk Menunjang Akuntabilitas Publik Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Manado. Vol.4 No.3,

- (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/14289>, diakses 22 Januari 2018).
- Mohamad Mahsun. 2013. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Penerbit BPF: Yogyakarta.
- Muh. Irfan, Budi Santoso & Lukman Effendi. 2016. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Asimetri Informasi, Penekanan Anggaran dan Komitmen Organisasional sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, (Online), Vol. 17 No. 2, (<http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/1434>, diakses 22 Januari 2018).
- Rahmad Hidayat. 2015. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Akuntansi*. Universitas Negeri Padang. Padang. Vol.3, No.1.
- Rolly Yandra dan Endang Sutrisna. 2013. Penyusunan Apbd Berbasis Kinerja. *Jurnal Kebijakan Publik*, (Online), Volume 4, Nomor 2, (<https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/2202>, diakses 22 Januari 2018).
- Sem Paulus Silalahi. 2012. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pemerintahan di Kota Dumai). *Jurnal Ekonomi*. Universitas Riau. Pekanbaru. Volume 20, Nomor 3.
- Seto Wibisono, Ikhsan Budi Riharjo. 2016. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, (Online), Volume 5, Nomor 63 (<http://journal.maranatha.edu/index.php/jmm/article/view/13/13>, diakses Januari 2018).
- Taufik Kurrohman. 2013. Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value For Money Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, (Online), Vol. 5, No. 1, (<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda/article/view/2558>, diakses 22 Januari 2018).
- Wiwik Andriani dan Ermataty Hatta. 2012. Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Pusat (Studi pada Politeknik Negeri Padang). *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, (Online), Vol 7 No.2, (<http://repo.polinpdg.ac.id/457/1/583>, diakses 22 Januari 2018).

Yulianti, umi. 2015. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa). Seminar Nasional ISBN 978-602-73690-3-0. Universitas PGRI Yogyakarta

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Proses Pengambilan Data



Proses Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



MARINI INDRIANI, lahir di Sangiang, Kec. Wera, Kab. Bima pada tanggal 07 April 1993. Anak ke Tiga dari Tiga bersaudara dari pasangan Jarudin dan Siti Hawa. Jenjang pendidikan yang diikuti penulis mulai dari SD Negeri Inpres Pulau tamat pada tahun 2005, di tahun 2007 penulis melanjutkan pendidikan ketingkat SMP Negeri 3 Wera dan tamat pada tahun 2009, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Wera dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan ditingkat perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi (S1). Berkat lindungan Allah SWT, dan iringan doa dari orangtua serta saudara, juga berkat bimbingan para dosen dan support dari teman-teman seperjuangan, sehingga dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi penulis berhasil menyusun skripsi dengan judul : **“Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dalam menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Makassar”**.